



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2018-2023**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020**

Jl. Bukit Baka Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik
Telp. (0532) 2071042, Kode Pos 74662



KATA PENGANTAR

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau periode 2018-2023 merupakan bagian integral dari program pembangunan Pemerintah Kabupaten Lamandau yang merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk 5 (lima) tahun kedepan dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD 2018-2023 sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau, sebagaimana diamanatkan pada Perubahan RPJMD Kabupaten Lamandau.

Dengan disusunnya Perubahan RENSTRA ini, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan kedepan yang tentunya saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan, agar skala prioritas setiap kegiatan dan program Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau lebih konkrit. Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Perubahan RENSTRA termasuk indikator-indikator kinerjanya sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan.

Semoga Perubahan RENSTRA ini dapat menjadi acuan dalam menjalankan Program dan Kegiatan setiap tahunnya selama periode 5 (lima) tahun kedepan.

Nanga Bulik, Juli 2021

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Lamandau,

GANTI PHAING KANISA, S.STP

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19770225 199612 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BABI PENDAHULUAN	Bab I-1
1.1 LATAR BELAKANG.....	Bab I-1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	Bab I-2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	Bab I-6
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	Bab I-6
BABII GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	Bab II-1
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	Bab II-1
2.1.1 Tugas Pokok.....	Bab II-1
2.1.2 Fungsi.....	Bab II-1
2.1.3 Struktur Organisasi	Bab II-2
2.2 SUMBER DAYA DISKOMINFO	Bab II-2
2.2.1 Sumber Daya Manusia	Bab II-2
2.2.2 Aset dan Inventarisasi yang Dikelola	Bab II-4
2.3 KINERJA PELAYANAN DISKOMINFO	Bab II-12
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SOPD	Bab II-15
BABIII PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	Bab III-1
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	Bab III-1
3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH.....	Bab III-3
3.3 TELAAHAN RENSTRA PROVINSI	Bab III-5
3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)	Bab III-6
3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS.....	Bab III-6
BABIV TUJUAN DAN SASARAN	Bab IV-1
4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH.....	Bab IV-1
BABV STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	Bab V-1
5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH	Bab V-1
5.2 ANALISIS SWOT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Bab V-7
BABVI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	Bab VI-1
BABVII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	Bab VII-1
BAB VIII PENUTUP	Bab VIII-1



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Daftar Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Golongan/Kepangkatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau Aset/Sarana dan Prasarana Pendukung	Bab II-3
Tabel 2.2	Daftar Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Jabatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau	Bab II-3
Tabel 2.3	Daftar Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Diklat Penjurangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau.....	Bab II-3
Tabel 2.4	Daftar Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau.....	Bab II-4
Tabel 2.5	Sarana dan Prasarana	Bab II-4
Tabel 2.6	Inventaris Ruangan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau	Bab II-4
Tabel 2.7	Inventaris Ruangan Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau	Bab II-5
Tabel 2.8	Inventaris Ruangan Bidang Pengelolaan Media Publik dan Kehumasan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau	Bab II-6
Tabel 2.9	Inventaris Ruangan Bidang Pengelolaan Infrastruktur dan Ekosistem TIK Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau	Bab II-6
Tabel 2.10	Inventaris Ruangan Bidang Pengembangan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau.....	Bab II-6
Tabel 2.11	Inventaris Ruangan Bidang Statistik, Manajemen Data dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau	Bab II-7
Tabel 2.12	Inventaris Ruangan Dapur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau	Bab II-7
Tabel 2.13	Sarana dan Prasarana (Kondisi Aset) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau	Bab II-7
Tabel 2.14	Pencapaian Kinerja Pelayanan DISKOMINFO Kabupaten Lamandau	Bab II-13
Tabel 2.15	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DISKOMINFO Kabupaten Lamandau	Bab II-14
Tabel 3.1	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.....	Bab III-3



Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bab III-4
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi/Kabupaten/Kota Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	Bab III-5
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan.....	Bab IV-2
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	Bab V-2
Tabel 6.1	Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif.....	Bab VI-2
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	Bab VII-1



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jln. Bukit Baka Kompleks Perkantoran Bukit Hibul, Nanga Bulik Kode Pos 74662
Telp. (0532) 2071042 Email : kominfo@lamandaukab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR : 050/ /KOMINFO/VII/2021

TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2018-2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LAMANDAU,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023, dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana diatur dalam Pasal 119-Pasal123, perlu menetapkan Keputusan Kepala DISKOMINFO Kabupaten Lamandau tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) DISKOMINFO Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Nomor 4720);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
14. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 05 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 01);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 Seri E);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 – 2033;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 198);
31. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 477);
32. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) DISKOMINFO Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rancangan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) DISKOMINFO Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) DISKOMINFO Kabupaten Lamandau.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik
Pada tanggal Juli 2021

Kepala DISKOMINFO
Kabupaten Lamandau,

GANTI PHAING KANISA, S.STP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770225 199612 1 001



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang begitu pesat telah mengiringi proses perubahan tatanan dunia dari yang bersifat terbatas menjadi tanpa batas. Pesatnya informasi global kini tidak hanya merambah di wilayah perkotaan saja, tetapi telah sampai ke pelosok pedesaan sehingga mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat. Meski demikian perubahan tersebut masih terjadi adanya kesenjangan dalam bidang informasi dan komunikasi yang disebabkan oleh beberapa hal.

Beberapa hal terjadinya kesenjangan tersebut antara lain: keberagaman tingkat pendidikan masyarakat, budaya, dan kondisi geografis dan ketersediaan infrastruktur. Kondisi demikian tentu menjadi tugas negara dalam hal ini pemerintah untuk memfasilitasinya dalam rangka mengurangi kesenjangan tersebut sehingga masyarakat mudah memperoleh informasi yakni melakukan pemerataan infrastruktur, pendayagunaan media informasi dan pemberdayaan lembaga komunikasi masyarakat.

Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan memerlukan dukungan ketersediaan informasi yang cepat, tepat, mudah dan akurat. Oleh karena itu, untuk mendukung kebutuhan tersebut perlu manajemen pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi yang didukung jaringan informasi dan komunikasi yang mencakup semua SKPD.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau merupakan suatu unit kerja yang dipercaya sebagai pengelola, pelaksanaan kebijakan dibidang Komunikasi dan Informasi, Persandian dan Statistik. Untuk itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau akan berupaya untuk selalu meningkatkan pelayanan dibidang Komunikasi, Teknologi Informasi, Sandi dan Statistik sehingga dapat menjadi pusat informasi bagi kebutuhan Pemerintah pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai OPD yang membidangi kominfo, persandian dan statistik, maka disusunlah Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Lamandau untuk kurun waktu (5) lima tahun ke depan untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2018 s/d 2023 sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamandau 2018-2023 dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi 4 (empat) proses, yaitu (1) persiapan penyusunan renstra; (2) penyusunan rancangan renstra; (3) penyusunan rancangan akhir; dan (4) penetapan.

Penyesuaian terhadap perubahan renstra mutlak dilakukan, dikarenakan perubahan renstra tersebut disusun mengacu kepada perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Lamandau 2018-2023.

Fungsi Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah :

1. Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan yang realistis, konsisten dengan visi, misi dan tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau dalam kerangka waktu sesuai kapasitas OPD dalam implementasinya
2. Menerjemahkan arah dan kebijakan pemerintah daerah terkait perkembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat
3. Memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau
4. Merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan
5. Membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 dilakukan dengan berlandaskan kepada



beberapa ketentuan hukum, perundang-undangan, dan peraturan pendukung lainnya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas



- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
 14. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau



- Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
 25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 05 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5,



- Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 01);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 Seri E);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 – 2033;
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 198);
 31. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 477);
 32. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengesahan Rencana Strategis SKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau adalah memberikan pedoman/landasan serta arah pembangunan bidang komunikasi, informatika, sandi dan statistik di Kabupaten Lamandau selama lima tahun ke depan.

Tujuan disusunnya Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau tahun 2018 s/d 2023 adalah :

1. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya agar



- lebih terarah, fokus dan sesuai dengan Perubahan Renstra.
2. Mewujudkan sinergitas antar unit kerja dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau terhadap program dan kegiatan tahun 2018 s/d 2023.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau Tahun 2018 -2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Perubahan Renstra OPD, fungsi Perubahan Renstra OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Perubahan Renstra OPD, keterkaitan Perubahan Renstra OPD dengan Perubahan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi dan Renstra kabupaten dengan Renja OPD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Kominfo serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Kominfo.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kominfo.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renstra Dinas Kominfo serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

Berisi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan eselon terendah Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan asset.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Layanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Perangkat Daerah dan Renstra Dinas Provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan visi, misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kerjanya.



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Pada bagian ini berisikan kaidah pelaksanaan Perubahan Renstra.

**BAB II****GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH****2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI****2.1.1 Tugas Pokok**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau melaksanakan tugas penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian. Tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2 Fungsi

Sedangkan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau adalah:

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintahan Daerah;
2. Evaluasi, pengendalian dan pelaporan kebijakan teknis bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintahan Daerah;
3. Bimbingan teknis bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintahan Daerah;
4. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
5. Pembinaan jabatan fungsional;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



2.1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau, maka struktur organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - a. Sub bagian perencanaan dan pengendalian program;
 - b. Sub bagian keuangan dan aset; dan
 - c. Sub bagian umum dan kepegawaian.
3. Bidang Pengelolaan Media Publik dan Kehumasan
 - a. Seksi kemitraan media dan informasi publik;
 - b. Seksi pengelolaan aspirasi dan kelompok informasi publik; dan
 - c. Seksi produksi, dokumentasi dan diseminasi informasi.
4. Bidang Pengelolaan Infrastruktur dan Ekosistem TIK
 - a. Seksi pengembangan infrastruktur telekomunikasi dan informatika;
 - b. Seksi pengawasan dan pengendalian infrastruktur TIK;
 - c. Seksi pengembangan sumber daya TIK.
5. Bidang Pengembangan E-Government
 - a. Seksi layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi
 - b. Seksi Penyelenggaraan Ekosistem E-Government
 - c. Seksi Tata Kelola E-Government
6. Bidang Statistik, Manajemen Data dan Persandian
 - a. Seksi statistik sektoral;
 - b. Seksi pengelolaan data statistik dan integrasi sistem informasi;
 - c. Seksi persandian dan pengamanan data.
7. Kelompok Jabatan Fungsional

2.2 SUMBER DAYA DISKOMINFO

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebanyak **48** orang dengan rincian sebagai berikut :



a. Jumlah ASN berdasarkan Tingkat Golongan / Kepangkatan

Jumlah ASN dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau berdasarkan tingkat golongan / kepangkatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Daftar Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Golongan / Kepangkatan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau

No	Golongan	Jumlah (orang)	Keterangan
1.	II	7	
2.	III	14	
3.	IV	5	
	Jumlah	26	

b. Jumlah ASN berdasarkan Tingkat Jabatan

Jumlah ASN dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau berdasarkan tingkat jabatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Daftar Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Jabatan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau

No	Tingkat Jabatan	Jumlah (orang)	Keterangan
1.	Eselon IV	7	
2.	Eselon III	5	
3.	Eselon II	1	
	Jumlah	13	

c. Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Diklat Penjurangan

Jumlah ASN dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau berdasarkan tingkat diklat penjurangan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Daftar Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Diklat Penjurangan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau

No	Tingkat Jabatan	Jumlah (orang)	Keterangan
1.	SPAMA / ADUM / PIM IV	5	
2.	SEPALA / ADUMLA	-	
3.	SPADYA / PIM III	2	
4.	SESPA / PIM II	-	
	Jumlah	7	

d. Jumlah ASN/THL berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah ASN/THL dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Daftar Jumlah ASN/THL Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Keterangan
1.	SD Sederajat	1	
2.	SLTP Sederajat	3	
3.	SMA Sederajat	15	
4.	D - III	3	
5.	D - IV	-	
6.	S - 1	24	
7.	S - 2	2	
	Jumlah	46	

2.2.2 Aset dan Inventaris yang Dikelola

Sampai dengan 31 Desember 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau memiliki Aset dan Inventaris sebagai berikut :

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika	1
2.	Rumah Dinas Penjaga Kantor	1
3.	Garasi	1
4.	Garasi Mobil Dinas	1
5.	Kendaraan Dinas Roda 4	4
6.	Kendaraan Dinas Roda 2	11

Tabel 2.6
Inventaris Ruangan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lamandau

No Urut	Nama Barang / Jenis Barang	Bahan	Jumlah Barang / Register	Keadaan Barang	Kebutuhan
A.	Ruang Kepala Dinas				
1.	Meja Biro	Kayu	2 Buah	B	
2.	Kursi Eselon	Besi/Busa	1 Buah	B	
3.	Kursi Lipat	Besi/Busa	2 Buah	B	



No Urut	Nama Barang / Jenis Barang	Bahan	Jumlah Barang / Register	Keadaan Barang	Kebutuhan
A.	Ruang Kepala Dinas				
4.	Kursi Kayu	Kayu/Busa	1 Buah	B	
5.	Sofa	Busa/Campuran	1 Buah	B	
6.	Filing Kabinet	Campuran	1 Buah	B	
7.	AC	Campuran	1 Unit	B	
8.	Kipas Angin Gantung	Campuran	2 Buah	KB	
9.	Kipas Angin Duduk	Campuran	1 Buah	B	
10.	Kulkas	Campuran	1 Unit	B	
11.	TV	Campuran	1 Unit	B	
12.	Dispenser	Campuran	1 Unit	B	
13.	Printer	Campuran	1 Unit	B	
14.	Vaccum Cleaner	Campuran	1 Unit	B	
15.	Proyektor	Campuran	1 Unit	B	
16.	Karpet	Campuran	1 Buah	B	

Tabel 2.7
Inventaris Ruangan Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lamandau

No Urut	Nama Barang / Jenis Barang	Bahan	Jumlah Barang / Register	Keadaan Barang	Kebutuhan
B.	Ruangan Sekretariat				
1.	Meja Biro	Kayu	6 Buah	B	
2.	Meja ½ Biro	Kayu	7 Buah	B	
3.	Almari	Campuran	7 Buah	B	
4.	Kursi Eselon	Busa	5 Buah	B	
5.	Filing Kabinet	Besi	3 Buah	B	
6.	Kursi Lipat	Besi/Busa	7 Buah	B	
7.	Kursi Kayu	Kayu/Busa	5 Buah	B	
8.	Sofa	Busa	2 Unit	B	
9.	Meja Panjang	Kayu	3 Buah	B	
10.	Printer	Campuran	5 Unit	B	
11.	Komputer PC	Campuran	4 Unit	B	



No Urut	Nama Barang / Jenis Barang	Bahan	Jumlah Barang / Register	Keadaan Barang	Kebutuhan
B.	Ruangan Sekretariat				
12.	Laptop	Campuran	8 Unit	B	
13.	Dispenser	Campuran	4 Unit	B	
14.	AC	Campuran	7 Unit	B	
15.	Brankas	Besi	1 Unit	B	
16.	Kipas Angin Gantung	Campuran	3 Unit	B	
17.	Gorden	Campuran	1 Paket	B	

Tabel 2.8
Inventaris Ruangan Bidang Pengelolaan Media Publik dan Kehumasan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau

No Urut	Nama Barang / Jenis Barang	Bahan	Jumlah Barang / Register	Keadaan Barang	Kebutuhan
C.	Bidang Pengelolaan Media Publik dan Kehumasan				
1.	Meja Biro Eselon III	Kayu / kaca	1	B	
2.	Kursi Biro Eselon III	Plastik /Busa	3	B	
3.	Meja Eselon IV	Kayu	3	B	
4.	Kursi Eselon IV	Plastik / Busa	3	B	
5.	Kursi Lipat	Besi /Busa	2	B	
6.	Laptop	Plastik / kaca	1	B	
7.	Komputer PC	Campuran	3	B	
8.	Gorden	Kain	1	B	
9.	AC	Campuran	1	B	
10.	Printer	Plastik	3	B	
11.	Rak Arsip Besi	Besi	1	B	

Tabel 2.9
Inventaris Ruangan Bidang Pengelolaan Infrastruktur dan Ekosistem TIK
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau

No Urut	Nama Barang / Jenis Barang	Bahan	Jumlah Barang / Register	Keadaan Barang	Kebutuhan
D.	Ruangan Bidang Pengelolaan Infrastruktur dan Ekosistem TIK				
1.	Meja Biro Eselon III	Kayu	3	B	
2.	Kursi Lipat	Besi, Busa	2	B	
3.	Kursi Eselon III	Besi, Busa	2	B	
4.	Laptop	Elektronik	2	B	
5.	Meja Biro Eselon IV	Kayu	1	B	
6.	Kursi Eselon IV	Besi, Busa	5	B	



No Urut	Nama Barang / Jenis Barang	Bahan	Jumlah Barang / Register	Keadaan Barang	Kebutuhan
D.	Ruangan Bidang Pengelolaan Infrastruktur dan Ekosistem TIK				
7.	AC	Elektronik	2	B	
8.	Printer	Plastik	1	B	
9.	Rak Arsip	Kayu	1	B	

Tabel 2.10
Inventaris Ruang Bidang Pengembangan E-Government
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau

No Urut	Nama Barang / Jenis Barang	Bahan	Jumlah Barang / Register	Keadaan Barang	Kebutuhan
E.	Bidang Pengembangan E-Government				
1.	Laptop	Elektronik	1	B	
2.	Kursi Lipat	Busa, Besi	7	B	
3.	Kursi Eselon III	Busa, Besi	2	B	
4.	Kursi Eselon IV	Busa, Besi	2	B	
5.	Filing Kabinet	Besi	1	B	
6.	Rak Arsip	Kayu	1	B	
7.	Meja Eselon III	Kayu	1	B	
8.	Meja Eselon IV	Kayu	3	B	
9.	Printer	Plastik	1	B	
10.	AC	Plastik	1	B	
11.	Gorden	Kain	1	B	

Tabel 2.11
Inventaris Ruang Bidang Statistik, Manajemen Data dan Persandian
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau

No Urut	Nama Barang / Jenis Barang	Bahan	Jumlah Barang / Register	Keadaan Barang	Kebutuhan
F.	Bidang Statistik, Manajemen Data dan Persandian				
1.	Komputer PC	Elektronik	2	B	
2.	Kursi Lipat	Busa, Besi	2	B	
3.	Kursi Eselon III	Busa, Besi	1	B	
4.	Kursi Eselon IV	Busa, Besi	1	B	
5.	Rak Arsip	Kayu	1	B	
6.	Meja Eselon III	Kayu	3	B	
7.	Meja Eselon IV	Kayu	2	B	
8.	Printer	Plastik	2	B	
9.	AC	Plastik	2	B	
10.	Gorden	Kain	1	B	



Tabel 2.12
Inventaris Ruangan Dapur
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau

No Urut	Nama Barang / Jenis Barang	Bahan	Jumlah Barang / Register	Keadaan Barang	Kebutuhan
G.	Dapur				
1.	Dispenser	Plastik	1	B	
2.	Galon	Plastik	1	B	
3.	Rak Piring	Aluminium	1	B	
4.	Peralatan Dapur	Pecah Belah	1 Paket	B	
5.	Peralatan Dapur	Pecah Belah	1 Paket	B	

Tabel 2.13
Sarana dan Prasarana (Kondisi Aset)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau

NAMA_KETERANGAN	NILAI	SATUAN
I. Telekomunikasi		
1. Layanan Telepon Seluler		
1. Jumlah Desa Terlayani		
Lamandau	2	Desa
Delang	1	Desa
Bulik	6	Desa
Bulik Timur	2	Desa
Menthobi Raya	3	Desa
Sematu Jaya	5	Desa
Belantikan Raya	2	Desa
Batang Kawa	1	Desa
2. Jumlah Desa Belum Terlayani		
Lamandau	9	Desa
Delang	10	Desa
Bulik	8	Desa
Bulik Timur	10	Desa
Menthobi Raya	8	Desa
Sematu Jaya	3	Desa



NAMA_KETERANGAN	NILAI	SATUAN
Belantikan Raya	3	Unit
Batang Kawa	-	Unit
4. Jumlah Provider		
Lamandau	1	Provider
Delang	1	Provider
Bulik	4	Provider
Bulik Timur	2	Provider
Menthobi Raya	2	Provider
Sematu Jaya	3	Provider
Belantikan Raya	1	Provider
Batang Kawa	-	Provider
2. Layanan Telepon Kabel		
1. Jumlah Jaringan Telepon Tersedia		
Lamandau	-	SS
Delang	-	SS
Bulik	415	SS
Bulik Timur	-	SS
Menthobi Raya	-	SS
Sematu Jaya	-	SS
Belantikan Raya	-	SS
Batang Kawa	-	SS
2. Jumlah Jaringan Terpasang		
1. Jumlah Sambungan Rumah Tangga	273	SS
2. Jumlah Sambungan Perkantoran	143	SS
3. Jumlah Sambungan Swasta / Dunia Usaha	-	SS
4. Jumlah Telepon Umum Koin	-	SS
5. Jumlah Telepon Umum Kartu	-	SS
6. Jumlah Warung Telepon	-	SS



NAMA_KETERANGAN	NILAI	SATUAN
3. Layanan Internet		
1. Jumlah Desa Terlayani		
Lamandau	2	Desa
Delang	-	Desa
Bulik	6	Desa
Bulik Timur	2	Desa
Menthobi Raya	3	Desa
Sematu Jaya	5	Desa
Belantikan Raya	2	Desa
Batang Kawa	1	Desa
2. Jumlah Desa Belum Terlayani		
Lamandau	9	Desa
Delang	11	Desa
Bulik	8	Desa
Bulik Timur	10	Desa
Menthobi Raya	8	Desa
Sematu Jaya	3	Desa
Belantikan Raya	10	Desa
Batang Kawa	8	Desa
II. POS		
1. Jumlah Kantor Pos		
Lamandau	-	Desa
Delang	-	Desa
Bulik	1	Desa
Bulik Timur	-	Desa
Menthobi Raya	-	Desa



NAMA_KETERANGAN	NILAI	SATUAN
Sematu Jaya	1	Desa
Belantikan Raya	-	Desa
Batang Kawa	-	Desa
2. Jumlah Kantor Pos Pembantu		
Lamandau	-	Desa
Delang	-	Desa
Bulik	-	Desa
Bulik Timur	-	Desa
Menthobi Raya	-	Desa
Sematu Jaya	-	Desa
Belantikan Raya	-	Desa
Batang Kawa	-	Desa
3. Jumlah Desa Terlayani Pos Keliling		
Lamandau	-	Desa
Delang	-	Desa
Bulik	-	Desa
Bulik Timur	-	Desa
Menthobi Raya	-	Desa
Sematu Jaya	-	Desa
Belantikan Raya	-	Desa
Batang Kawa	-	Desa
III. Layanan Media Elektronik		
1. Radio		
1. Jumlah Stasiun Radio		
1. Jumlah Stasiun Radio Pemerintah	1	Stasiun
2. Jumlah Stasiun Radio Swasta	4	Stasiun



NAMA_KETERANGAN	NILAI	SATUAN
2. Cakupan Layanan		
1. Jumlah Kecamatan Terlayani	8	*
2. Jumlah Kecamatan Belum Terlayani	-	*
2. Televisi		
1. Jumlah Stasiun Televisi		
1. Jumlah Stasiun Televisi Pemerintah	-	Stasiun
2. Jumlah Stasiun Televisi Swasta	2	Stasiun
2. Cakupan Layanan		
1. Jumlah Kecamatan Terlayani	2	*
2. Jumlah Kecamatan Belum Terlayani	6	*
IV. Media Cetak		
1. Surat Kabar Nasional	10	
1. Jumlah Kecamatan Terlayani	8	
2. Jumlah Kecamatan Belum Terlayani	-	
2. Surat Kabar Lokal	9	
1. Jumlah Kecamatan Terlayani	8	
2. Jumlah Kecamatan Belum Terlayani	-	

Sumber :Data Diskominfo Tahun 2017

2.3 KINERJA PELAYANAN DISKOMINFO

Pencapaian kinerja DISKOMINFO Kabupaten Lamandau berdasarkan Rencana Strategis periode sebelumnya 2013-2018, dalam tabel pencapaian kinerja pelayanan DISKOMINFO ini dapat kami simpulkan, bahwa tidak terdapat kesenjangan dari masing-masing indikator kinerja sesuai dengan tugas pokok, dan fungsi DISKOMINFO. Selain itu kami pun mencoba untuk melakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD menggunakan pelaksanaan Renstra DISKOMINFO periode sebelumnya 2013-2018, agar dapat mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan DISKOMINFO 2013 sampai 2018.



2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan SOPD

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau, dapat dilakukan dengan menggunakan analisa metode SWOT.

1. Faktor Internal:

a. Kekuatan/Potensi (*Strength*)

- 1) Adanya Dinas Kominfo sebagai penggerak untuk pemanfaatan TIK di Kabupaten Lamandau;
- 2) Dinas Kominfo sudah memiliki bidang yang spesifik membidangi TIK;
- 3) Sudah ada proses untuk memiliki roadmap berupa masterplan e-Government;
- 4) Sudah ada budaya untuk menggunakan komputer;
- 5) Sudah ada kesadaran peran TIK di dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
- 6) Sudah ada jaringan internet di masing-masing OPD;
- 7) Dinas Kominfo menyiapkan sub-domain secara terpusat untuk masing-masing OPD;
- 8) Tiap OPD sudah mempunyai PC dengan jumlah yang beragam;
- 9) Jaringan intranet Kabupaten Lamandau sudah dimanfaatkan untuk akses sistem informasi internal Kabupaten Lamandau;
- 10) Sudah memiliki jaringan hotspot untuk layanan Publik;
- 11) Kabupaten Lamandau sudah memiliki website di <http://lamandaukab.go.id>;
- 12) Beberapa OPD sudah memiliki website dengan penamaan subdomain dibawah lamandaukab.go.id;
- 13) Sudah memiliki aplikasi- aplikasi yang menunjang dalam urusan internal dan pelayanan publik.

b. Kelemahan (*Weaknes*)

- 1) Kesesuaian tupoksi dan pelaksanaan antara pegawai TIK dan non TIK belum optimal;



- 2) Peran Diskominfo belum optimal sebagai pengelola TIK yang terpusat;
- 3) Belum optimalnya sinergi antar OPD untuk membangun e-Government;
- 4) Belum memiliki SOP-SOP tentang penggunaan TIK dan Keamanan TIK;
- 5) Belum memiliki kebijakan strategis dan operasional tentang penyelenggaraan pemerintah berbasis TIK;
- 6) Belum memiliki pranata komputer di setiap OPD;
- 7) Belum memiliki standar kompetensi untuk SDM bidang TIK;
- 8) Masih belum optimalnya pengembangan SDM bidang TIK;
- 9) Jumlah SDM bidang TIK masih dirasa kurang;
- 10) Belum memiliki pranata komputer di semua OPD dan Kecamatan;
- 11) Beberapa Server aplikasi masih berada di masing-masing OPD;
- 12) Tingkat ketersediaan (*availability*) jaringan intranet masih kurang;
- 13) Belum adanya sistem monitoring dan deteksi kegagalan jaringan;
- 14) Masih kurangnya sistem pengamanan informasi;
- 15) Masing-masing OPD sebagian besar belum memiliki SOP BCP (*Business Continuity Planning*);
- 16) Belum memiliki sistem DRC (*Disaster Recovery Center*) di Dinas Kominfo maupun di tempat lain;
- 17) Belum ada jaringan WAN antar OPD;
- 18) Koneksi internet masing-masing OPD belum dikelola oleh Dinas Kominfo;
- 19) Belum ada integrasi sistem antar OPD dan antar aplikasi;
- 20) Server Aplikasi belum terpusat di Data Center;
- 21) Masih belum optimalnya penggunaan email resmi Pemerintah Kabupaten Lamandau @lamandaukab.go.id;
- 22) Belum memiliki dokumen aplikasi;
- 23) Belum memiliki sistem web portal yang mengintegrasikan seluruh website Daerah dan OPD-OPD.

2. Faktor Eksternal :

a. Kesempatan/Peluang (*Oportunity*)

- 1) Keinginan untuk memperkuat pengelolaan TIK Kabupaten Lamandau terpusat di Dinas Kominfo;
- 2) Ada keinginan untuk mewujudkan percepatan penyelenggaraan TIK;
- 3) Ada keinginan OPD-OPD untuk menerapkan SOP-SOP Pengelolaan TIK di internal OPD masing-masing;
- 4) Ada keinginan untuk menambah SDM TIK di masing-masing OPD;
- 5) Ada keinginan untuk menerapkan kompetensi keahlian di bidang TIK;
- 6) Ada keinginan untuk membangun infrastruktur di seluruh wilayah administratif Kabupaten Lamandau;
- 7) Ada keinginan untuk membangun Data center;
- 8) Ada keinginan untuk menempatkan semua server aplikasi terpusat di Data center;
- 9) Ada keinginan untuk membuat virtualisasi server;
- 10) Ada keinginan untuk menerapkan standar keamanan ISO 27001;
- 11) Ada keinginan untuk menerapkan sistem kinerja pemerintahan yang terintegrasi;
- 12) Ada keinginan untuk mengimplementasikan aplikasi pengelolaan dan berbagi dokumen secara digital.

b. Tantangan/Ancaman (*Treath*)

- 1) Belum semua OPD menyerahkan tata kelola TIK ke Dinas Kominfo;
- 2) Belum ada SOP Tata kelola TIK;
- 3) Belum ada SOP manajemen proyek TIK;
- 4) Belum ada SOP untuk manajemen risiko TIK;
- 5) SDM TIK yang ada di OPD tidak fokus dibidang TIK saja, tapi juga memiliki tupoksi di bidang lain;
- 6) Belum optimalnya anggaran untuk pengembangan SDM TIK;
- 7) Penggunaan bandwidth yang bukan untuk pekerjaan;



- 8) Infrastruktur server masih ada di masing-masing OPD dan pihak ketiga;
- 9) Belum ada standar keamanan untuk infrastruktur jaringan yang ada;
- 10) Belum pernah dilakukan audit untuk keamanan jaringan.

Peluang yang mungkin diterapkan dalam upaya pengembangan pelayanan antara lain adanya kemungkinan mendapatkan tambahan dana perimbangan dengan mengoptimalkan kinerja para Aparatur Sipil Negara.



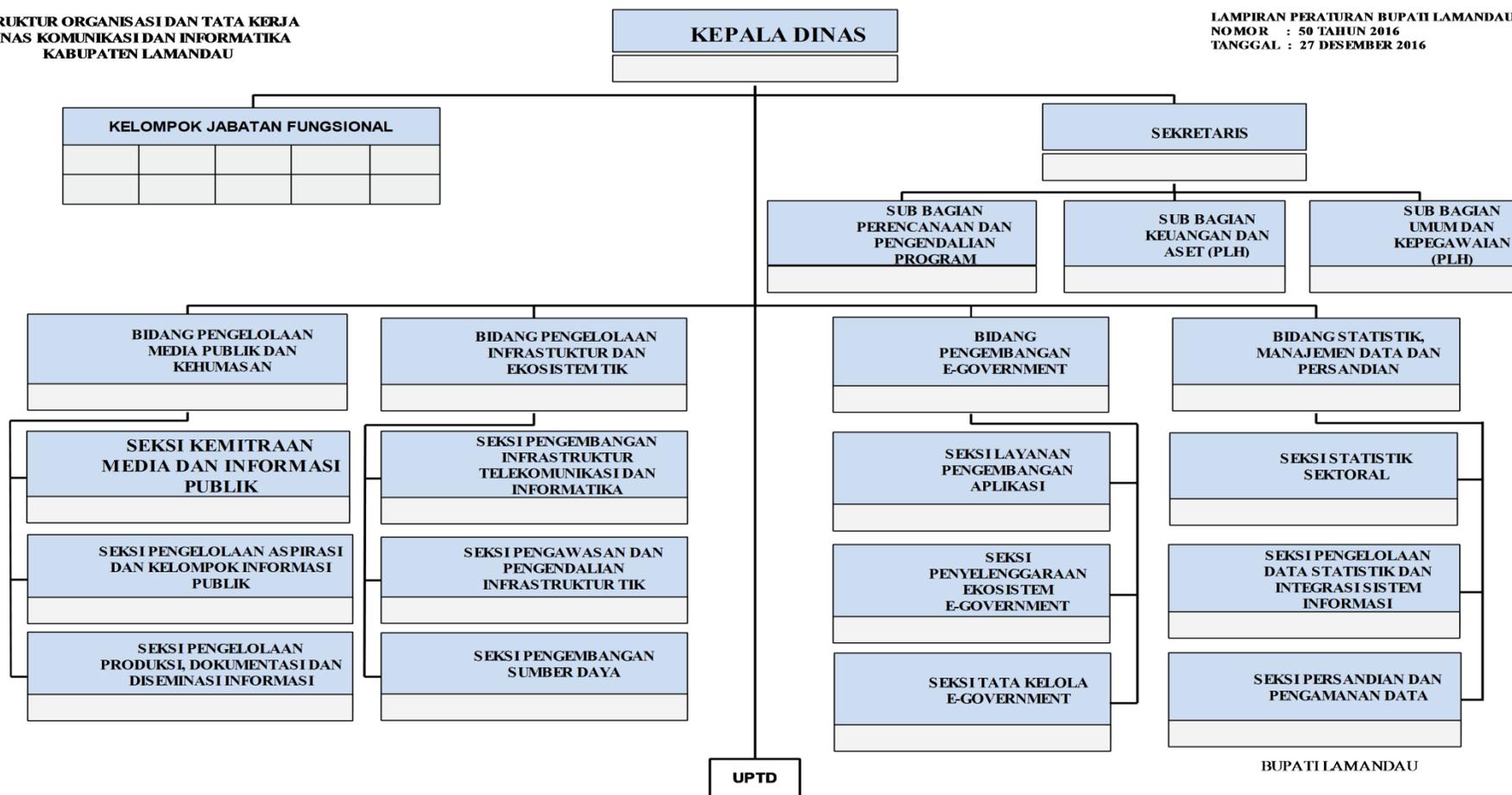
**BAB
II**

PERUBAHAN RENSTRA DINAS KOMINFO KABUPATEN LAMANDAU 2018-2023

Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LAMANDAU

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR : 50 TAHUN 2016
TANGGAL : 27 DESEMBER 2016



BUPATI LAMANDAU

Ir. MARUKAN, M.A.P



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dinas Komunikasi dan Informatika pada dasarnya berfungsi sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang aktif mengoptimalkan penyebarluasan informasi melalui TIK pada 5 (lima) tahun ke depan dimana informasi yang disampaikan merupakan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat.

Informasi melalui TIK sebagai bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat sehingga perlu dibangun kedepan dalam skala prioritas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pengembangan TIK merupakan issue strategis pada 5 (lima) tahun kedepan.

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau, ada 3 tugas pokok yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu menyelenggarakan pelayanan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik.

Dalam Urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik ada 2 (dua) tugas utama yang harus dilakukan, yaitu:

1. Peningkatan akses informasi dan komunikasi bagi aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau serta bagi masyarakat.

Era globalisasi berdampak kepada kebutuhan masyarakat akan informasi. Kebutuhan akan informasi dan selalu up to date dengan perkembangan dunia menjadi bagian dari kebutuhan primer masyarakat dewasa ini. Untuk itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau akan terus aktif meningkatkan akses informasi melalui layanan online berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK). Adapun akses informasi yang sudah ada adalah situs resmi (website) Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau yang beralamat di www.lamandaukab.go.id, dan beberapa situs resmi OPD Pemda Kabupaten Lamandau lainnya. Hal tersebut semata-mata untuk membuka akses informasi, dan memberikan ruang gerak bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses pemerintahan dan pembangunan.

Adapun yang menjadi faktor pendorong dan penghambat dalam kegiatan ini adalah:

a. Faktor Pendorong :

Telah terbentuknya OPD khusus (Dinas Komunikasi dan Informatika) yang menangani TIK;

b. Faktor penghambat:

- 1) Tidak tersedianya anggaran yang cukup memadai;
- 2) Sarana dan Prasarana yang kurang memadai;
- 3) Masih perlu adanya penambahan sumber daya manusia.

2. Penyebarluasan Informasi Pemerintah dan Pembangunan Daerah

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lamandau sangat penting untuk disosialisasikan kepada masyarakat secara formal maupun informal, untuk mendapatkan *feed back* sehingga kebijakan yang diambil tersebut dapat dirasakan masyarakat, dan bisa betul-betul sampai kepada tujuan yang ingin dicapai.

Selama ini sosialisasi kebijakan dan program pembangunan dilaksanakan dengan sistem tradisional, yang notabene selalu menggunakan media kertas, layar dan media cetak lainnya. Namun dengan memasyarakatnya teknologi informasi melalui media digital internet, maka penyebarluasan informasi menjadi semakin cepat dan efektif dalam melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat.

Dalam rangka sosialisasi pembangunan dan informasi kegiatan pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Lamandau juga memanfaatkan sarana cetak lainnya berupa majalah, baliho, spanduk, leaflet, brosur dan lainnya yang semuanya dilakukan dengan perangkat TIK. Adapun faktor pendorong dan penghambat dalam kegiatan ini diantaranya :

a. Faktor Pendorong :

- 1) Adanya pemanfaatan teknologi yang mendukung sosialisasi pembangunan;
- 2) Tersedianya layanan internet untuk mendukung penyampaian informasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

b. Faktor Penghambat:

- 1) Fasilitas penunjang informasi dan komunikasi yang masih terbatas;
- 2) Perlunya peningkatan kerjasama dan dukungan dari berbagai OPD dalam penyampaian informasi.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH

Sebelum menetapkan Visi, Misi dan Program Kerja Dinas, maka perlu dikaji secara mendalam Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) terpilih yang dimuat dalam Perubahan RPJMD 2018-2023.

Berdasarkan naskah Perubahan RPJMD Kabupaten Lamandau 2018-2023, Visi, Misi, dan Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati adalah:

Tabel 3.1
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Visi	Misi
<p style="text-align: center;"><i>BERGERAK CEPAT MEMBANGUN KABUPATEN LAMANDAU DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MENUJU KABUPATEN LAMANDAU JUARA (Jujur, Unggul, Adil, Religius dan Aman)</i></p>	<ol style="list-style-type: none">1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Cerdas, Sehat dan Sejahtera.3. Memperkuat Kemandirian Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan dan Kelestarian Lingkungan Hidup.4. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Bermoral, Religius dan Aman Berdasarkan Nilai Nilai dan Kearifan Budaya Lokal.5. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas untuk Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: BERGERAK CEPAT MEMBANGUN KABUPATEN LAMANDAU DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MENUJU KABUPATEN LAMANDAU JUARA (Jujur, Unggul, Adil, Religius dan Aman)				
No	Misi Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)			
	Fokus Program :			
	<p>Birokrasi yang baik dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) menjadi modal utama didalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Lamandau dalam sisa tahun perencanaan kedepan. Tata kelola pemerintahan yang baik akan menciptakan kinerja perangkat daerah menjadi lebih efektif dan efisien sehingga capaian kinerja pemerintah daerah dapat dicapai sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Birokrasi yang bersih juga menjadi kunci utama kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah, dengan kepercayaan masyarakat yang tinggi maka program-program pembangunan daerah dapat berjalan dengan masyarakat yang partisipatif. Pada akhirnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan mampu menciptakan pelayanan publik pada masyarakat yang berkualitas. Kebijakan-kebijakan strategis yang dilakukan untuk mendorong birokrasi yang baik dan bersih meliputi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya Rencana Induk Tata Kelola TIK - Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. - Belum optimalnya penyebaran informasi kepada masyarakat - Masih terjadinya kesenjangan dibidang komunikasi sosial dan teknologi informasi (<i>digital device</i>) di masyarakat khususnya antara kota dan desa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya sumber daya manusia yang profesional dan terampil. - Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK - Belum adanya aturan baku /standarisasi yang mengatur urusan dibidang komunikasi, informatika, sandi dan statistik seperti website pemerintah dan SKPD, hosting, colocation, dll. - Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat - Kurangnya kemampuan mengintegrasikan sistem informasi dan database OPD. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepedulian pimpinan terhadap bidang kominfo, sandi dan statistik. - Kebutuhan masyarakat akan peningkatan Kualitas pelayanan publik. - Kebutuhan akan pengembangan muatan e-Government.

Dengan memperhatikan tabel tersebut di atas, tampak jelas bahwa hasil akhir yang diharapkan dari seluruh rangkaian perencanaan pembangunan Kabupaten Lamandau adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Kabupaten Lamandau JUARA (Jujur, Unggul, Adil, Religius dan Aman).

Pemerintahan yang baik merupakan keinginan masyarakat yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik yang baik, hal tersebut menekan pemerintah untuk dapat melaksanakan pelayanan yang optimal, karena bersamaan dengan peningkatan pengetahuan dan keberanian masyarakat harus diimbangi pula dengan perubahan penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien.

3.3 TELAAHAN RENSTRA PROVINSI

Sebagaimana disebutkan dimuka, Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 disusun dengan berpedoman kepada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamandau Tahun 2018 – 2023. Sedangkan dalam skala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Renstra merupakan acuan dari bidang-bidang dan bagian dalam Dinas Komunikasi dan Informasi untuk menyusun rencana kerja tahunan.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi/Kabupaten/Kota
berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Mengengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi/Kabupaten /Kota	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		- Belum adanya Rencana Induk - Tata Kelola TIK	- Terbatasnya sumber daya manusia yang profesional dan terampil.	- Kepedulian pimpinan terhadap bidang kominfo, sandi dan statistik.
2		- Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	- Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK	- Kebutuhan masyarakat akan peningkatan kualitas pelayanan publik.
3		- Belum optimalnya penyebarluasan informasi kepada masyarakat	- Belum adanya aturan baku/standarisasi yang mengatur urusan di bidang	- Kebutuhan akan pengembangan muatan e-

4		<ul style="list-style-type: none">- Masih terjadinya kesenjangan dibidang komunikasi sosial dan teknologi informasi (<i>digital device</i>) di masyarakat khususnya antara kota dan desa.	<ul style="list-style-type: none">komunikasi, informatika, sandi dan statistik seperti website pemerintah dan SKPD, hosting, colocation,dll.- Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat- Kurangnya kemampuan mengintegrasikan sistem informasi dan database OPD	Government.
---	--	---	---	-------------

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika telaahan RTRW dan KLHS tidak langsung berhubungan dengan pelayanan OPD.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis yang akan dihadapi pada rentang waktu tahun 2018-2023 antara lain:

1. Tata Kelola

Penerapan Teknologi Informasi di lingkungan Kabupaten Lamandau digerakkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, yang sekaligus sebagai penanggung jawab tata kelola TI dan *e-Government* di Kabupaten Lamandau. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

2. Kebijakan

Dalam memberikan kekuatan dan payung hukum dalam menyelenggarakan TIK di lingkungan pemerintah Kabupaten Lamandau, perlu dibuat kebijakan TIK berupa Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati tentang penyelenggaraan TIK dan Tata Kelola TIK. Saat ini Pemerintah Kabupaten Lamandau belum memiliki kebijakan tentang tata

kelola dan penyelenggaraan pemerintah berbasis TIK. Penggunaan TIK di instansi pemerintahan masih sebatas kebutuhan setiap OPD, dan mengikuti kebutuhan dari pemerintah pusat. Sehingga penyelenggaraan pemerintah TIK belum berbasis strategi dan perencanaan yang baik.

3. Kompetensi SDM

Untuk menunjang penerapan TIK dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau dibutuhkan kompetensi SDM khususnya dibidang TIK. Sebagian besar OPD belum memiliki operator TIK yang memiliki kompetensi khusus di bidang TIK. Dinas Kominfo Kabupaten Lamandau sebagai OPD yang masih baru, saat ini memiliki **13** orang pelaksana, dan **22** tenaga harian lepas yang bertugas membantu operasional di masing-masing bidang. Namun ditinjau dari sisi kompetensi, masih perlu melakukan peningkatan kompetensi SDM terutama yang berhubungan dengan 10 urusan pokok Dinas Kominfo di Pemerintah Daerah.

4. Arsitektur Aplikasi dan Informasi

Aplikasi yang saat ini ada dilingkungan pemerintah Kabupaten Lamandau, adalah aplikasi sistem informasi untuk masyarakat yang berupa web, dan aplikasi internal di setiap OPD. Aplikasi web dapat dikunjungi di alamat <http://lamandaukab.go.id>. Untuk website OPD-OPD lain, sudah menggunakan subdomain dibawah lamandaukab.go.id. Website yang ada antara lain website informasi OPD, dan website layanan publik seperti perijinan online, pengaduan masyarakat, informasi lelang dan lainnya. Selain website sistem informasi yang disajikan untuk masyarakat umum dan bisnis, masih terdapat banyak aplikasi internal yang digunakan oleh masing-masing OPD. Aplikasi tersebut berada dimasing-masing OPD dan pihak ketiga.

5. Arsitektur Infrastruktur

Infrastruktur jaringan di Pemerintah Kabupaten Lamandau, secara umum masih terkonsentrasi dimasing-masing OPD. Setiap OPD mengelola jaringan LAN masing-masing, dan menyewa jaringan internet masing-masing.



Selain jaringan LAN yang berbasis kabel UTP, disetiap OPD juga menyediakan jaringan hotspot berbasis wireless yang digunakan untuk akses perangkat laptop dan perangkat mobile lainnya. Karena pengelolaan infrastruktur jaringan diserahkan kepada masing-masing, sehingga tidak ada standarisasi penggunaan hardware, konfigurasi dan keamanannya. Jaringan antar OPD masih belum terhubung secara lokal/WAN. Komunikasi antar OPD menggunakan jaringan internet yang disewa masing-masing OPD. Sehingga aplikasi internal dan penggunaan internet menjadi satu melalui bandwidth internet.

Server aplikasi internal OPD saat ini masih dikelola oleh masing-masing OPD. Beberapa aplikasi internal yang berbagi pakai berada dan dikelola sendiri oleh OPD terkait. Sebagai contoh aplikasi SIMDA Keuangan, SIMDA Gaji, SIMDA BMD yang dipakai oleh semua OPD, dikelola oleh Badan Keuangan Daerah.

Dinas Kominfo Kabupaten Lamandau belum sepenuhnya menjalankan tata kelola IT terpusat, dikarenakan masih terkendala di sisi infrastruktur dan SDM pengelolanya. Sebagian besar Server digunakan untuk mengelola website kabupaten, webmail, dan aplikasi layanan kepada masyarakat masih berada di Sekretariat Daerah. Selain aplikasi internal, Pemerintah Kabupaten Lamandau juga memiliki aplikasi yang terkait dengan pemerintah pusat seperti hampir semua aplikasi di Dinas Pendidikan, server aplikasinya dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI. Begitu juga dengan Dinas Sosial dan Dinas Pertanian dan Perikanan juga menggunakan aplikasi yang dikelola oleh kementerian terkait.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Adapun tujuan yang akan dicapai adalah “***Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi***”.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.



Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja pada Tahun Ke				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi		Indeks SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik)	1,7- 1,8	1,8 - 2,6	1,8 - 2,6	2,6 - 3,5	2,6 - 3,5
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik berbasis Teknologi Informasi	Persentase OPD yang berbasis SPBE	3%	6%	12%	18%	22%
			Persentase Sistem data dan statistik sektoral yang terintegrasi di lingkungan kabupaten	19,44%	38,89%	61,11%	80,56%	100%
			Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	20%	40%	60%	80%	100%



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan OPD dalam lima tahun mendatang, yaitu tabel 5.1.

5.2 ANALISIS SWOT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Analisis SWOT merupakan teknik dalam membedah kasus sebagai kekuatan (*strenght*), kelemahan (*weakness*), kesempatan/ peluang (*opportunity*) dan ancaman (*trheat*). Tendensi (*trend*) atau terjadi dengan mengancam perkembangan atau keberlangsungannya organisasi. Instansi dan/atau pemerintah daerah dapat menerapkan SWOT sebagai salah satu alat analisisnya. Informasi hasil analisis SWOT dimanfaatkan dalam mengantisipasi kekuatan dan kelemahan internal organisasi dan memahami peluang dan tantangan eksternal organisasi pemerintahannya.

Pemetaan SWOT Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut :

Komponen	Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none">➤ Adanya Dinas Kominfo sebagai penggerak untuk pemanfaatan TIK di Kabupaten Lamandau➤ Dinas Kominfo sudah memiliki bidang yang spesifik membidangi TIK	<ul style="list-style-type: none">• Kesesuaian tupoksi dan pelaksanaan antara pegawai TIK dan non TIK belum optimal• Peran Diskominfo belum optimal sebagai pengelola TIK yang terpusat• Belum optimalnya sinergi antar OPD untuk membangun <i>e- Government</i>
Hukum dan Kebijakan	<ul style="list-style-type: none">➤ Sudah ada proses untuk memiliki roadmap berupa masterplan <i>e-Government</i>	<ul style="list-style-type: none">• Belum memiliki SOP-SOP tentang penggunaan TIK dan Keamanan TIK• Belum memiliki kebijakan strategis dan operasional tentang penyelenggaraan pemerintah berbasis TIK



Komponen	Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none">➤ Sudah ada budaya untuk menggunakan komputer➤ Sudah ada kesadaran peran TIK di dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik	<ul style="list-style-type: none">• Belum memiliki prana komputer di setiap OPD• Belum memiliki standar kompetensi untuk SDM bidang TIK• Masih belum optimalnya pengembangan SDM bidang TIK• Jumlah SDM bidang TIK masih dirasa kurang• Belum memiliki prana komputer di semua OPD dan Kecamatan
Infrastruktur TIK	<ul style="list-style-type: none">➤ Sudah ada jaringan internet di masing-masing OPD➤ Dinas Kominfo menyiapkan sub-domain secara terpusat untuk masing-masing OPD➤ Tiap OPD sudah mempunyai PC dengan jumlah yang beragam➤ Jaringan intranet Kabupaten Lamandau sudah dimanfaatkan untuk akses sistem informasi internal Kabupaten Lamandau➤ Sudah memiliki jaringan hotspot untuk layanan Publik	<ul style="list-style-type: none">• Beberapa Server aplikasi masih berada di masing-masing OPD• Tingkat ketersediaan (<i>availability</i>) jaringan intranet masih kurang• Belum adanya sistem <i>monitoring</i> dan deteksi kegagalan jaringan• Masih kurangnya sistem pengamanan informasi• Masing-masing OPD sebagian besar belum memiliki SOP BCP (<i>Business Continuity Planning</i>)• Belum memiliki sistem DRC (<i>Disaster Recovery Center</i>) di Dinas Kominfo maupun di tempat lain• Belum ada jaringan WAN antar OPD• Koneksi internet masing-masing OPD belum dikelola oleh Dinas Kominfo

Komponen	Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
Sistem Informasi	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Kabupaten Lamandau sudah memiliki website di http://lamandaukab.go.id ➢ Beberapa OPD sudah memiliki website dengan penamaan subdomain dibawah lamandaukab.go.id ➢ Sudah memiliki aplikasi-aplikasi yang menunjang dalam urusan internal dan pelayanan publik 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada integrasi sistem antar OPD dan antar aplikasi • Server Aplikasi belum terpusat di <i>Data Center</i> • Masih belum optimalnya penggunaan email resmi Pemerintah Kabupaten Lamandau @lamandaukab.go.id • Belum memiliki dokumen aplikasi • Belum memiliki sistem web portal yang mengintegrasikan seluruh website Daerah dan OPD-OPD

Analisis SWOT Faktor Eksternal Kabupaten Lamandau

Komponen	Peluang (<i>Opportunities</i>)	Tantangan (<i>Threats</i>)
Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Keinginan untuk memperkuat pengelolaan TIK Kabupaten Lamandau terpusat di Dinas Kominfo 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum semua OPD menyerahkan tata kelola TIK ke Dinas Kominfo
Hukum dan Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Ada keinginan untuk mewujudkan percepatan penyelenggaraan TIK ➢ Ada keinginan OPD-OPD Untuk menerapkan SOP-SOP Pengelolaan TIK di internal OPD masing-masing 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada SOP Tata kelola TIK • Belum ada SOP manajemen Proyek TIK • Belum ada SOP untuk manajemen risiko TIK
Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Ada keinginan untuk menambah SDM TIK di masing-masing OPD ➢ Ada keinginan untuk menerapkan kompetensi keahlian di bidang TIK 	<ul style="list-style-type: none"> • SDM TIK yang ada di OPD tidak fokus dibidang TIK saja,tapi juga memiliki tupoksi di bidang lain • Belum optimalnya anggaran untuk pengembangan SDM TIK

Komponen	Peluang (<i>Opportunities</i>)	Tantangan (<i>Threats</i>)
Infrastruktur TIK	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ada keinginan untuk membangun infrastruktur di seluruh wilayah administratif Kabupaten Lamandau ➤ Ada keinginan untuk membangun <i>Data center</i> ➤ Ada keinginan untuk menempatkan semua server aplikasi terpusat di <i>Datacenter</i> ➤ Ada keinginan untuk membuat virtualisasi server ➤ Ada keinginan untuk menerapkan standar keamanan ISO 27001 	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan bandwidth yang Bukan untuk pekerjaan. • Infrastruktur server masih ada di masing-masing OPD dan Pihak ketiga • Belum ada standar keamanan untuk infrastruktur jaringan yang ada • Belum pernah dilakukan audit untuk keamanan jaringan
Sistem Informasi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ada keinginan untuk menerapkan sistem kinerja pemerintahan yang terintegrasi ➤ Ada keinginan untuk mengimplementasikan aplikasi pengelolaan dan berbagi dokumen secara digital 	<ul style="list-style-type: none"> • Umumnya output Informasi yang diberikan masih bersifat deskriptif • Belum optimalnya aplikasi layanan yang langsung menyentuh masyarakat • Belum pernah dilakukan audit untuk keamanan sistem informasi

Merujuk hasil analisis penyusunan *Strength, Weakness, Opportunity, dan Treath* (SWOT) yang didasarkan dari permasalahan dan isu strategis terkait sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi selanjutnya adalah dilakukan penyilangan *antara* kekuatan internal dan kekuatan eksternal sehingga dapat menghasilkan beberapa strategi yang tepat dalam rangka mewujudkan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Dimana penyilangan antara *Strength, Weakness, Opportunity, dan Treath* (SWOT) akan menghasilkan strategi (SO), penyilangan antara *Strength* dan *Treath* menghasilkan strategi (ST), penyilangan antara *Weakness* dan *Opportunity* menghasilkan Strategi (WO) dan penyilangan antara *Weakness* dan *Threats* menghasilkan strategi (WT).

Matriks Analisis SWOT Kelembagaan, Hukum dan Kebijakan Kabupaten Lamandau

<p style="text-align: center;">Matriks SWOT</p>	<p style="text-align: center;">S (Strength) – Kekuatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Dinas Kominfo sebagai penggerak untuk pemanfaatan TIK di Kabupaten Lamandau 2. Dinas Kominfo sudah memiliki bidang yang spesifik membidangi TIK 3. Sudah ada proses untuk memiliki roadmap berupa masterplan e-Government 	<p style="text-align: center;">W (Weaknesses) – Kelemahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian tupoksi dan pelaksanaan antara pegawai TIK dan non TIK belum optimal 2. Peran Diskominfo belum optimal sebagai pengelola TIK yang terpusat 3. Belum optimalnya sinergi antar OPD untuk membangun e-Government 4. Belum memiliki SOP-SOP tentang penggunaan TIK dan Keamanan TIK 5. Belum memiliki kebijakan strategis dan operasional tentang penyelenggaraan pemerintah berbasis TIK
<p style="text-align: center;">O (Opportunities) – Peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keinginan untuk memperkuat pengelolaan TIK Kabupaten Lamandau terpusat di Dinas Kominfo 2. Ada keinginan untuk mewujudkan percepatan penyelenggaraan TIK 3. Ada keinginan OPD-OPD untuk menerapkan SOP-SOP Pengelolaan TIK di internal OPD masing-masing 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ S1-S2&O1-O3: Memperkuat pengelolaan TIK dengan membuat SOP-SOP yang berkaitan tentang Tata Kelola TIK di Pemerintah Kabupaten Lamandau ❖ S3&O1-O2: Membuat <i>roadmap</i> masterplan <i>e- Government</i> ❖ S1-S2&O3: Membuat SOP-SOP baru yang diperlukan dalam hal Tata Kelola TIK (Perencanaan, Anggaran, Realisasi, Pengoperasian, dan Monitoring) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ W1-W3&O1-O3: Dinas Kominfo akan meningkatkan Peran dan sumber daya TIK, monitoring dan kontrol TIK, membuat rencana TIK yang fokus terwujudnya smartcity serta mengelola integrasi sistem informasi antar OPD lain ▪ W4-W5&O1-O3: Dengan adanya <i>review</i> roadmap berupa masterplan Teknologi Informasi dan Tata Kelola TIK akan mewujudkan pengelolaan TIK yang benar dan terarah sehingga tahapan-tahapan menuju <i>e-Government</i> akan mudah dikontrol dan dimonitor



<p>T (Threats) –Tantangan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Belum semua OPD menyerahkan tata kelola TIK ke Dinas Kominfo2. Belum ada SOP Tata kelola TIK3. Belum ada SOP manajemen proyek TIK4. Belum ada SOP untuk manajemen risiko TIK	<p>❖ S1-S3&T1-T4: Perlu adanya panduan tata kelola TIK yang dijalankan oleh Dinas Kominfo</p>	<p>▪ W1-W5 & T1-T4: Perlu adanya Kebijakan strategis dan operasional tentang tata kelola dan penyelenggaraan TIK</p>
---	--	---

Matrik Analisis SWOT Kelembagaan, Hukum dan Kebijakan Kabupaten Lamandau

	S (Strength) – Kekuatan	W (Weaknesses) – Kelemahan
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Dinas Kominfo sebagai penggerak untuk pemanfaatan TIK di Kabupaten Lamandau 2. Dinas Kominfo sudah memiliki bidang yang spesifik membidangi TIK 3. Sudah ada proses untuk memiliki roadmap berupa masterplan e-Government 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian tupoksi dan pelaksanaan antara pegawai TIK dan non TIK belum optimal 2. Peran Diskominfo belum optimal sebagai pengelola TIK yang terpusat 3. Belum optimalnya sinergi antar OPD untuk membangun e-Government 4. Belum memiliki SOP-SOP tentang penggunaan TIK dan Keamanan TIK 5. Belum memiliki kebijakan strategis dan operasional tentang penyelenggaraan pemerintah berbasis TIK
O (Opportunities) – Peluang <ol style="list-style-type: none"> 1. Keinginan untuk memperkuat pengelolaan TIK Kabupaten Lamandau terpusat di Dinas Kominfo 2. Ada keinginan untuk mewujudkan percepatan penyelenggaraan TIK 3. Ada keinginan OPD-OPD untuk menerapkan SOP-SOP Pengelolaan TIK di internal OPD masing-masing 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ S1-S2&O1-O3:Memperkuat pengelolaan TIK dengan membuat SOP-SOP yang berkaitan tentang Tata Kelola TIK di Pemerintah Kabupaten Lamandau ❖ S3&O1-O2: Membuat <i>roadmap</i> masterplan <i>e-Government</i> ❖ S1-S2&O3:Membuat SOP-SOP baru yang diperlukan dalam hal Tata Kelola TIK (Perencanaan, Anggaran, Realisasi, Pengoperasian, dan Monitoring) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ W1-W3&O1-O3:Dinas Kominfo akan meningkatkan peran dan sumber daya TIK, monitoring dan kontrol TIK, membuat rencana TIK yang fokus terwujudnya smartcity serta mengelola integrasi sistem informasi antar OPD lain ▪ W4-W5&O1-O3:Dengan adanya <i>review</i> roadmap berupa masterplan Teknologi Informasi dan Tata Kelola TIK akan mewujudkan pengelolaan TIK yang benar dan terarah sehingga tahapan-tahapan menuju <i>e-Government</i> akan mudah dikontrol dan dimonitor



<p>T (Threats) -Tantangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum semua OPD menyerahkan tata kelola TIK ke Dinas Kominfo 2. Belum ada SOP Tata kelola TIK 3. Belum ada SOP manajemen proyek TIK 4. Belum ada SOP untuk manajemen risiko TIK 	<p>❖ S1-S3&T1-T4:Perlu adanya panduan tata kelola TIK yang dijalankan oleh Dinas Kominfo</p>	<p>▪ W1-W5 & T1-T4: Perlu adanya Kebijakan strategis dan operasional tentang tata kelola dan penyelenggaraan TIK</p>
--	---	---

Matriks Analisis SWOT SDM Kabupaten Lamandau

<p>Matriks SWOT</p>	<p>S (Strength) - Kekuatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah ada budaya untuk menggunakan komputer 2. Sudah ada kesadaran peran TIK di dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik 	<p>W (Weaknesses) - Kelemahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum memiliki pranata komputer di setiap OPD 2. Belum memiliki standar kompetensi untuk SDM Bidang TIK 3. Masih belum optimalnya pengembangan SDM Bidang TIK 4. Jumlah SDM bidang TIK masih dirasa kurang
----------------------------	--	---



<p>O (Opportunities) – Peluang</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ada keinginan untuk menambah SDM TIK di masing-masing OPD2. Ada keinginan untuk menerapkan kompetensi keahlian dibidang TIK	<ul style="list-style-type: none">❖ S1-S2&O1:Perlu mendefinisikan tupoksi, anggaran, dan honor untuk para operator TIK sehingga sistem informasi tidak terbengkalai❖ S1-S2&O2:Perlu melakukan asesmen SDM bidang TIK untuk membuat roadmap pelatihan SDM bidang TIK	<ul style="list-style-type: none">▪ W1& O1-O2: Perlu adanya pranata komputer di setiap OPD yang berfungsi sebagai operator TIK di masing- masing OPD▪ W2-W4&O1-O2: Perlu mengalokasikan anggaran untuk pengembangan sumber daya manusia dalam bentuk pelatihan yang profesional di bidang TIK baik untuk operator TIK maupun pengguna sistem informasi di tiap OPD
<p>T (Threats) –Tantangan</p> <ol style="list-style-type: none">1. SDM TIK yang ada di OPD tidak fokus di bidang TIK saja, tapi juga memiliki tupoksi di bidang lain2. Belum optimalnya anggaran untuk pengembangan SDM TIK	<ul style="list-style-type: none">❖ S1-S2&T1-T2: Perlu peningkatan anggaran yang difokuskan kepada pengembangan SDM TIK	<ul style="list-style-type: none">▪ W1-W4&T1-T2:Perlu dilakukan penambahan dan pengembangan khusus terkait SDM TIK melalui diklat bidang TIK

**Matriks Analisis SWOT Infrastruktur dan Sistem Informasi Kabupaten Lamandau**

Matriks SWOT	S (Strength)-Kekuatan	W (Weaknesses) – Kelemahan
	<ol style="list-style-type: none">1. Sudah ada jaringan internet dimasing-masing OPD2. Dinas Kominfo menyiapkan sub-domain secara terpusat untuk masing-masing OPD3. Tiap OPD sudah mempunyai PC dengan jumlah yang beragam4. Jaringan intranet Kabupaten Lamandau sudah dimanfaatkan untuk akses sistem informasi internal Kabupaten Lamandau5. Sudah memiliki jaringan hotspot untuk layanan Publik6. Kabupaten Lamandau sudah memiliki website di http://lamandaukab.go.id7. Beberapa OPD sudah memiliki website dengan penamaan subdomain dibawah lamandaukab.go.id8. Sudah memiliki aplikasi-aplikasi yang menunjang dalam urusan internal dan pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none">1. Belum ada jaringan WAN antar OPD2. Koneksi internet masing-masing OPD belum dikelola oleh Dinas Kominfo3. Sebagian besar Server aplikasi masih berada di masing-masing OPD4. Tingkat ketersediaan (<i>availability</i>) jaringan intranet masih kurang5. Belum adanya sistem <i>monitoring</i> dan deteksi kegagalan jaringan6. Masih kurangnya sistem pengamanan informasi7. Masing-masing OPD sebagian besar belum memiliki SOP BCP (<i>Business Continuity Planning</i>)8. Belum memiliki sistem DRC (<i>Disaster Recovery Center</i>) di Dinas Kominfo maupun di tempat lain9. Belum di integrasi sistem antar OPD dan antar aplikasi10. Server Aplikasi belum terpusat di <i>Data Center</i>11. Masih belum optimalnya penggunaan email resmi Pemerintah Kabupaten Lamandau @lamandaukab.go.id12. Belum memiliki dokumen aplikasi13. Belum memiliki sistem web portal yang mengintegrasikan seluruh website Daerah dan OPD-OPD



<p>O (Opportunity) - Peluang</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ada keinginan untuk membangun infrastruktur di seluruh wilayah administratif Kabupaten Lamandau2. Ada keinginan untuk membangun <i>Data center</i>3. Ada keinginan untuk menempatkan semua server aplikasi terpusat di <i>Data center</i>4. Ada keinginan untuk membuat virtualisasi server5. Ada keinginan untuk menerapkan standar keamanan ISO 270016. Ada keinginan untuk menerapkan sistem kinerja pemerintahan yang terintegrasi7. Ada keinginan untuk mengimplementasikan aplikasi pengelolaan dan berbagi dokumen secara digital	<ul style="list-style-type: none">❖ S1-S7&O1-O5:Perlu dibuat <i>roadmap</i> pengembangan infrastruktur jaringan TIK dan <i>Data center</i> di Pemda Kabupaten Lamandau❖ S1-S7&O6-O7:Perlu dibuat <i>roadmap</i> pengembangan sistem informasi di Pemda Kabupaten Lamandau	<ul style="list-style-type: none">▪ W1&O1-O7:Perlu membangun infrastruktur jaringan antar OPD sehingga mempercepat koneksi dan efisiensi biaya▪ W2-W5&O1-O4: Pengembangan infrastruktur TIK harus dikelola secara terpusat agar lebih efektif dan efisien serta memudahkan dalam pengelolaannya▪ W6&O5: Menggunakan standarisasi keamanan berbasis ISO 27001▪ W7-W8&O1-O4: Membuat SOP BCP (<i>Business Continuity Plan</i>) dan memberikan layanan DRC untuk masing-masing server OPD, baik yang sudah ada di <i>Data center</i> maupun yang masih di lokasi OPD masing- masing.▪ W9-W10,W12-W13&O6-O7: Membangun <i>roadmap</i> tentang integrasi sistem informasi▪ W11&O1-O6:Membangun infrastruktur email server @lamandaukab.go.id yang handal
---	--	--



<p>T (Threats) –Tantangan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penggunaan bandwidth yang bukan untuk pekerjaan.2. Infrastruktur server masih ada di masing-masing OPD dan pihak ketiga3. Belum ada standar keamanan untuk infrastruktur jaringan yang ada4. Belum pernah dilakukan audit untuk keamanan jaringan5. Umumnya output Informasi yang diberikan masih bersifat deskriptif6. Belum optimalnya aplikasi layanan yang langsung menyentuh masyarakat7. Belum pernah dilakukan audit untuk keamanan sistem informasi	<ul style="list-style-type: none">❖ S1-S4&T1: Perlu diterapkan aturan dan SOP penggunaan bandwidth internet, sehingga pemakaiannya dapat lebih terarah❖ S1-S4&T2 : Mengoptimalkan dan menambah kapasitas Data center, sehingga pengelolaan infrastruktur lebih terpusat, efektif dan efisien❖ S1-S4&T3-T4: Menerapkan standar keamanan berbasis ISO 27001 dan menuangkannya dalam bentuk SOP❖ S5-S7&T5-T6:Perlu membuat sistem informasi yang bersifat diagnostik di level pimpinan untuk mengambil keputusan dan membuat aplikasi-aplikasi yang bersifat mobile yang langsung menyentuh masyarakat❖ S5-S7&T7: Melakukan audit sistem informasi oleh pihak ketiga, agar hasilnya obyektif dan mampu memberikan informasi kondisi keamanan sistem informasi yang ada	<ul style="list-style-type: none">▪ W1-W5&T1-T2:Perlu adanya pengaturan bandwidth berbasis prioritas dan klasifikasi trafik, sehingga penggunaan bandwidth bisa lebih berkualitas▪ W6-W8&T2-T4:Perlu dilakukan audit keamanan jaringan diseluruh infrastruktur jaringan yang ada▪ W9-W13&T5-T6:Mengoptimalkan penggunaan server di Data center dan membuat tata kelola sistem informasi yang digunakan diinternal maupun yang digunakan oleh masyarakat▪ W9-W13&T7: Melakukan proses audit keamanan sistem
---	--	---



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan indikatif sebagaimana tabel 6.1 berikut:

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD. Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD ini ditampilkan tabel berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada
Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Cakupan Layanan Telekomunikasi	tidak terhitung	44,28%	44,28%	45%	46%	47%	47%
2.	Jumlah Kantor Pos Pembantu menurut Kecamatan di Kabupaten Lamandau	2	2	2	2	2	2	2
	1. Bulik	1	1	1	1	1	1	1
	2. Sematu Jaya	1	1	1	1	1	1	1
	3. Mentobi Raya	0	0	0	0	0	0	0
3.	Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi	Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Buku Kabupaten Dalam Angka	Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.	Buku PDRB	Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.	Buku Statistik Daerah	Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada



7.	Buku Statistik Kesejahteraan Rakyat	Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
8.	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%



BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau Tahun 2018–2023 merupakan rencana tindak yang disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian tujuan dalam kurun waktu lima tahun untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat dibidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.

Renstra hanyalah dokumen perencanaan, sebagai apapun isi dari Renstra tidak akan mampu merubah Dinas Kominfo menjadi OPD yang hebat dan berhasil mewujudkan visi dan misinya tanpa adanya komitmen dan upaya sungguh-sungguh dari seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten Lamandau terutama Dinas Komunikasi dan Informatika.

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Perubahan Renstra ini harus dapat dicapai dan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik, sehingga seluruh komponen organisasi harus ikut terlibat dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu sumber daya manusia merupakan komponen organisasi yang sangat vital dan berfungsi sebagai penentu utama dalam mencapai tujuan yang harus dikelola secara profesional dan proporsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan dan prosedur yang tepat.

Akhir kata, semoga Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau ini dapat diimplementasikan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka terwujudnya *good governance* guna menuju terwujudnya masyarakat Kabupaten Lamandau JUARA (Jujur, Unggul, Adil, Religius dan Aman).

Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lamandau

Kepala Dinas,

GANTI PHAING KANISA. S.STP

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770225 199612 1 001



Tabel 2.14
Pencapaian Kinerja Pelayanan DISKOMINFO
Kabupaten Lamandau

No	Indikator Kinerja sesuai tugas & fungsi DISKOMINFO	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Restra SKPD Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Tahun ke				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat/publik			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100
2.	Jumlah jaringan komunikasi			35	31	32	33	34	35	31	32	33	34	35	100	100	100	100	100
	Buku Kabupaten Dalam Angka			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Buku PDRB Kabupaten			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Rasio warnet terhadap penduduk			0,23	0,157	0,173	0,19	0,209	0,23	0,157	0,173	0,19	0,209	0,23	100	100	100	100	100
4.	Jumlah jaringan komunikasi setiap kecamatan			48	35	25	25	40	48	35	25	25	40	48	100	100	100	100	100
5.	Jumlah jaringan internet untuk umum terpasang			100	69,25	75,25	85,5	93,25	100	69,25	75,25	85,5	93,25	100	100	100	100	100	100
6.	Cakupan masyarakat yang terlayani			1517	159	150	477	1264	1517	159	150	477	1264	1517	100	100	100	100	100

Kepala DISKOMINFO
Kabupaten Lamandau,

GANTI PHAING KANISA, S.STP
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 19770225 199612 1 001



Tabel 2.14
Pencapaian Kinerja Pelayanan DISKOMINFO
Kabupaten Lamandau

No	Indikator Kinerja sesuai tugas & fungsi DISKOMINFO	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Restra SKPD Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Tahun ke				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Cakupan Layanan Telekomunikasi			Persentase	tidak dihitu ng	tidak dihitu ng	tidak dihitu ng	tidak dihitu ng	tidak dihitu ng	tidak dihitu ng	tidak dihitu ng	tidak dihitu ng	tidak dihitu ng	tidak dihitu ng	tidak dihitu ng	tidak dihitu ng	tidak dihitu ng	tidak dihitu ng	tidak dihitu ng
2.	Jumlah Kantor Pos Pembantu menurut Kecamatan di Kabupaten Lamandau			Jumlah	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	tidak dihitu ng	tidak dihitu ng	tidak dihitu ng	tidak dihitu ng	tidak dihitu ng
	1. Bulik			Jumlah	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	tidak dihitu ng	tidak dihitu ng	tidak dihitu ng	tidak dihitu ng	tidak dihitu ng
	2. Sematu Jaya			Jumlah	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	tidak dihitu ng	tidak dihitu ng	tidak dihitu ng	tidak dihitu ng	tidak dihitu ng
	3. Mentohi Raya			Jumlah	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	tidak dihitu ng	tidak dihitu ng	tidak dihitu ng	tidak dihitu ng	tidak dihitu ng
3.	Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi			Ada/Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	tidak dihitu ng	tidak dihitu ng	tidak dihitu ng	tidak dihitu ng	tidak dihitu ng
4.	Buku Kabupaten Dalam Angka			Ada/Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	tidak dihitu ng	tidak dihitu ng	tidak dihitu ng	tidak dihitu ng	tidak dihitu ng
5.	Buku PDRB			Ada/Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	tidak dihitu ng	tidak dihitu ng	tidak dihitu ng	tidak dihitu ng	tidak dihitu ng
6.	Buku Statistik Daerah			Ada/Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	tidak dihitu ng	tidak dihitu ng	tidak dihitu ng	tidak dihitu ng	tidak dihitu ng

7.	Buku Statistik Kesejahteraan Rakyat			Ada/Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	tidak dihitung				
8.	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah			Persentase	tidak dihitung	tidak dihitung	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	tidak dihitung				

Kepala DISKOMINFO
Kabupaten Lamandau,

GANTI PHAING KANISA, S.STP
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 19770225 199612 1 001



**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DISKOMINFO
Kabupaten Lamandau**

No	Uraian	Anggaran pada tahun ke					Realisasi Anggaran pada tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata Rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	Belanja Tidak Langsung	1.369.408.108	1.506.348.919	1.913.861.324	2.097.207.978	2.224.964.353	1.254.621.335	1.410.854.186	1.657.157.514	2.054.774.637	1.991.355.490	92	94	87	98	90	1.822.358.136	1.673.752.632
B	Belanja Langsung	3.906.959.692	3.708.656.894	4.290.352.489	3.286.708.392	3.922.956.832	3.579.483.394	3.508.493.749	4.113.416.071	3.156.517.493	3.261.056.854	91,62	94,60	95,88	96,04	83,13	3.823.126.860	3.523.793.512
1.	Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Komunikasi	69.250.000	-	-	80.850.000	293.740.000	65.136.550	-	-	79.160.235	287.218.972	94,06	#DIV/0!	#DIV/0!	97,91	97,78	88.768.000	86.303.151
2.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitasi Komunikasi dan Informatika	38.470.000	69.930.000	69.990.000	387.899.856	59.400.000	32.726.429	51.573.375	63.564.918	359.350.427	37.790.280	85,07	73,75	90,82	92,64	63,62	125.137.971	109.001.086
3.	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	308.820.000	367.210.000	476.530.000	574.255.000	185.300.000	293.286.354	359.204.822	465.903.381	563.459.006	135.324.590	94,97	97,82	97,77	98,12	73,03	382.423.000	363.435.631
4.	Program Monitoring Bidang Komunikasi dan Informatika	34.970.000	24.980.000	24.970.000	77.200.000	-	32.039.514	24.780.160	24.630.408	76.397.120	-	91,62	99,20	98,64	98,96	#DIV/0!	32.424.000	31.569.440
5.	Program Pengembangan Data/Infomasi/ Statistik Daerah	670.700.000	746.230.000	859.470.000	379.020.000	499.445.000	614.495.340	740.260.160	847.781.208	375.078.192	364.744.684	91,62	99,20	98,64	98,96	73,03	630.973.000	588.471.917
6.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	-	1.304.676.965	1.381.348.832	-	-	-	1.219.174.409	1.088.553.033	0,00	0,00	0,00	93,45	78,80	537.205.159	461.545.488
7.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	1.020.076.691	442.000.000	-	-	-	934.594.264	418.132.000	0,00	0,00	0,00	91,62	94,60	292.415.338	270.545.253
8.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	-	-	-	30.000.000	30.000.000	-	-	-	30.000.000	30.000.000	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	12.000.000	12.000.000
9.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	75.400.000	28.600.000	-	-	-	72.414.160	23.646.480	0,00	0,00	0,00	96,04	82,68	20.800.000	19.212.128
10.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	-	-	-	-	286.354.000	-	-	-	-	279.996.941	-	-	-	-	97,78	57.270.800	55.999.388
11.	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	350.000.000	-	-	-	-	269.395.000	-	-	-	-	76,97	70.000.000	53.879.000
12.	Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	-	-	-	334.600.000	-	-	-	-	321.349.840	-	-	-	-	96,04	-	66.920.000	64.269.968
13.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	100,00	30.000.000	30.000.000
14.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	-	-	-	20.000.000	-	-	-	-	20.000.000	-	-	-	-	100,00	-	4.000.000	4.000.000
15.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	-	-	-	25.000.000	-	-	-	-	25.000.000	-	-	-	-	100,00	-	5.000.000	5.000.000
16.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	206.769.000	216.769.000	-	-	-	198.580.948	176.254.874	-	-	-	96,04	81,31	84.707.600	74.967.164



TABEL 5.1 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi		Bergerak cepat membangun Kabupaten Lamandau dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Kabupaten Lamandau JUARA (Jujur, Unggul, Adil, Religius dan Aman)			
Misi 1		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (KKN)			
Tujuan	Sasaran	Strategi		Kebijakan	
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas	1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	1	Memilih pihak ketiga yang kompeten dalam hal pelatihan dan pengembangan SDM TIK	1	Melakukan pelatihan di pihak ketiga
				2	Melakukan analisa hasil pelatihan
				3	Melakukan sertifikasi LSP bidang TIK, Jaringan,
		2	Menyusun draft kebijakan sesuai dengan format pemerintah daerah dan mengajukan ke Gubernur atau DPRD untuk menjadi Perbup atau Perda	1	Melakukan kajian studi kebijakan
				2	Melakukan analisa dampak resiko penggunaan TIK di
				3	Menyusun draft Kebijakan strategis TIK
				4	Mengajukan pengesahan untuk menjadi Perbup/Perda
		3	Instalasi fiber optic hingga ke seluruh OPD	1	Analisa dan survei coverage jaringan intranet
				2	Instalasi fiber optic
				3	Instalasi dan konfigurasi jaringan intranet antar OPD
		4	Instalasi fiber optic hingga ke seluruh OPD dan UPTD	1	Analisa dan survei
				2	Instalasi fiber optic
				3	Instalasi dan konfigurasi internet di OPD dan UPTD
		5	Memastikan kehandalan dan ketersediaan sistem informasi di Kabupaten Lamandau	1	Membangun Data Center dengan standard sesuai good
				2	Meletakkan seluruh perangkat jaringan dan server di
				3	Membangun redundansi di seluruh komponen (listrik, database, aplikasi, server)
		6	- Menambah server atau menambahkan komponen - Menambah block storage ke dalam SAN atau file storage ke dalam NAS	1	Melakukan analisis kebutuhan server dan storage per
				2	Analisa kebutuhan resource komponen server yang optimal untuk virtual machine
				3	Melakukan instalasi, konfigurasi dan manajemen server dan storage di host



				4	Penambahan server dan data store di virtual machine sesuai dengan kebutuhan
		7	Mengembangkan teknologi virtualisasi di setiap host server yang ada di dalam data center	1	Pengadaan server atau host sesuai spesifikasi yang di
				2	Instalasi, konfigurasi dan manage software virtualisasi
		8	Membangun aplikasi dan diterapkan mulai e-Musrenbang, e-Planning, e-Budgeting, e-Pendapatan, e-Monev, e-SAKIP dan e-LAKIP	1	terkait kinerja daerah yang sudah ada untuk persiapan
				2	Membangun web API untuk pengintegrasian semua aplikasi yang terkait kinerja daerah
				3	Instalasi dan konfigurasi sistem
				4	Sosialisasi penggunaan sistem
		9	Membangun aplikasi web berbasis web portal yang user-friendly untuk seluruh layanan pemerintah daerah Kabupaten Lamandau sehingga dapat diakses dengan cepat dan mudah	1	Membangun aplikasi web mulai dari OPD yang menjadi prioritas, ditampilkan pada web portal
				2	Mengisi content dan link di web portal tentang berbagai informasi dan layanan OPD
				3	Melakukan sosialisasi web portal ke seluruh masyarakat dan bisnis
		10	Menggalakkan program Go Green yang ramah lingkungan serta mempercepat proses birokrasi persuratan	1	Mengembangkan sistem TNDE
				2	Melakukan sosialisasi sistem TNDE di seluruh instansi
		11	Melakukan analisis 10 urusan e-Government dan menurunkannya menjadi detail kegiatan tupoksi	1	Melakukan kajian studi 10 urusan e-Government
				2	Melakukan analisis rincian kegiatan tupoksi
				3	Menyusun SOP
				4	Melakukan sosialisasi internal Dinas Kominfo
		12	Menambah jumlah dan spesifikasi hardware PC Pegawai	1	Melakukan analisis kebutuhan dan spesifikasi hardware PC yang ideal
				2	Melakukan pengadaan PC sesuai perencanaan
				3	Melakukan instalasi dan konfigurasi PC untuk pegawai



			13	Menggunakan SIMANTRA untuk setiap aplikasi yang ingin diintegrasikan	1	Melakukan proses analisa kebutuhan interoperability (pertukaran data) antar aplikasi
					2	Melakukan perencanaan dan desain pertukaran data antar aplikasi
					3	Pengembangan aplikasi pertukaran data berbasis
					4	Instalasi dan konfigurasi aplikasi terintegrasi berbasis
					5	Sosialisasi aplikasi terintegrasi berbasis SIMANTRA
			14	Memiliki server email yang dikelola oleh Dinas Kominfo untuk seluruh pegawai OPD Kabupaten Lamandau	1	Melakukan pengadaan, instalasi dan konfigurasi server email dengan domain sendiri
					2	Meningkatkan kualitas, kapasitas dan keamanan sistem email resmi
					3	Melakukan sosialisasi akan keberadaan sistem email resmi kepada seluruh pegawai OPD Kabupaten
					4	Membuat regulasi (Perbup atau SK Bupati) yang mengharuskan penggunaan email resmi Pemda
			15	Membangun aplikasi mobile dan penggunaan social media untuk pengaduan	1	Pengembangan aplikasi pengaduan berbasis mobile
					2	Meregister pengaduan melalui social media
					3	Mensosialisasikan penggunaan sistem pengaduan kepada masyarakat
					4	Menginstalasi dan konfigurasi aplikasi
					5	Sosialisasi penggunaan aplikasi
			16	Melakukan penetration test aplikasi yang terdapat di data center serta menerapkan digital certificate dan digital signature menggunakan CA resmi	1	Melakukan penetration test aplikasi berbasis web yang dikelola di data center
					2	Melakukan rekomendasi hasil penetration test aplikasi (secure programming)
					3	Menerapkan SSL seluruh aplikasi web menggunakan digital certificate yang diotorisasi oleh CA resmi
			17	Menentukan titik titik strategis untuk menambahkan hotspot	1	Memilih titik titik pemasangan hotspot
					2	Konfigurasi hotspot



			18	Membangun Sistem Informasi Eksekutif untuk Pemda dalam bentuk Dashboard Eksekutif yang menampilkan informasi pelayanan Pemda dan pembangunan Desa	1	Membangun struktur data yang terintegrasi
					2	Melakukan Data Warehousing ke dalam struktur data
					3	Mengembangkan aplikasi Dashboard untuk presentasi data dalam bentuk chart grafis
					4	Melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi Dashboard bagi pimpinan
			19	Membangun sistem informasi kebijakan pemerintah (JDIH)	1	Membangun sistem informasi kebijakan pemerintah
					2	Mengumpulkan dokumen yang ingin dipublish dengan digital signature
					3	Mengelola storage penyimpanan dokumen
					4	Mengsosialisaikan sistem informasi kepada masyarakat
			20	Mengggunakan 24 aplikasi generik dari Kementerian Kominfo	1	Menganalisa kebutuhan aplikasi setiap OPD yang sesuai dengan 24 aplikasi generik
					2	Mengajukan permohonan aplikasi generik yang akan
					3	Melakukan instalasi dan konfigurasi aplikasi generik
					4	Melakukan sosialisasi dan pelatihan aplikasi generik yang digunakan
21	Menyediakan kapasitas bandwidth Internet dan Intranet serta Server kepada seluruh OPD secara proporsional yang dikelola oleh Dinas Kominfo secara terintegrasi	1	Melakukan analisis penyediaan jumlah bandwidth yang sesuai pertahunnya			
		2	Mengelola kontrak dengan ISP (Internet Service Provider)			
		3	Mendistribusikan bandwidth Internet ke setiap OPD sesuai hasil analisis			
22	Konfigurasi pada level router, switch dan access point	1	Membuat standar konfigurasi jaringan LAN/WLAN			
		2	Melakukan pengecekan dan mengevaluasi konfigurasi jaringan LAN/WLAN OPD sesuai standar yang sudah			
		3	Menentukan klasifikasi trafik			
		4	Menentukan tipe queue (antrian)			
		5	Membuat bandwidth policy			
		6	Melakukan konfigurasi QoS di router OPD dan router edge gateway di Dinas Kominfo			



			23	Menunjuk pihak ketiga dan melakukan agreement untuk melakukan penetration test dan memberikan rekomendasi	<ol style="list-style-type: none"> 1 Melakukan seleksi pihak ketiga untuk melakukan penetration test 2 Melakukan proses penetration test khusus pada jaringan LAN/WAN (router, firewall) dan server di data center 3 Melakukan analisis dan evaluasi laporan hasil 4 Melakukan tindakan hardening sesuai rekomendasi
			24	Melakukan self-assessment untuk mencari celah keamanan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Merencanakan scope vulnerability assessment 2 Menyiapkan SDM dan tools untuk vulnerability 3 Melakukan analisis dan evaluasi laporan hasil vulnerability assessment 4 Melakukan tindakan hardening sesuai rekomendasi
			25	Membangun aplikasi mobile (mobile apps) yang user-friendly dan mendukung berbagai platform mobile sehingga dapat diakses oleh masyarakat secara luas	<ol style="list-style-type: none"> 1 Membangun aplikasi web service mulai dari OPD yang menjadi prioritas, ditampilkan pada mobile apps 2 Pembuatan aplikasi mobile (mobile apps) yang menampilkan seluruh layanan dan informasi utama di 3 Melakukan sosialisasi penggunaan mobile apps kepada masyarakat dan kalangan bisnis
			26	Memanfaatkan layanan Whistle Blowing System untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran (tindak pidana) tertentu yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau	<ol style="list-style-type: none"> 1 Melakukan analisa kebutuhan penggunaan layanan Whistle Blowing System (BWS) 2 Mengajukan aplikasi layanan Whistle Blowing System ke Kementerian Kominfo 3 Melakukan instalasi dan konfigurasi layanan Whistle Blowing System 4 Melakukan sosialisasi dan pelatihan penggunaan layanan Whistle Blowing System

Tabel 6.1
PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2019-2023)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023		target				Rp
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	(17)				(18)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			
Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik berbasis Teknologi Informasi			Indeks SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik)		1,7-1,8		1,8-2,6		1,8-2,6		2,6-3,5		2,6-3,5		2,6-3,5				
				Persentase Layanan yang berbasis SPBE		19%	3.862.889.188	39%	4.250.997.743	65%	5.246.619.743	89%	5.312.928.988	100%	5.379.353.854	100%	24.052.789.516			
		2.16.02	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Media Informasi Publik						100%	1.308.027.169	100%	1.148.502.674	100%	1.183.562.220	100%	3.640.092.063	Bidang Pengelolaan Media Publik dan Kehumasan		
		2.16.02.2.01	Keg. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Wilayah yang memiliki kesediaan Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar							1.308.027.169		1.148.502.674		1.183.562.220		3.640.092.063			
		2.16.02.2.01.05	Sub Keg. Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan RSPD, Terlaksananya penyebarluasan informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Publik melalui media					12 Media	1.291.151.652	12 Media	1.131.627.157	12 Media	1.166.349.193	36 Media	3.589.128.002				
		2.16.02.2.01.11	Sub Keg. Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Terlaksananya rapat kerja harmonisasi dan sinkronisasi PPID Utama dan PPID Pembantu					1 Laporan	16.875.517	1 Laporan	16.875.517	1 Laporan	17.213.027	3 Laporan	50.964.061				
		2.16.03	Program Aplikasi Informatika	Persentase OPD Yang Berbasis SPBE (Bid. E-Gov) Persentase Sistem TIK yang terbangun dalam mendukung E-Gov (Bid. Infrastruktur)						100%	48.582.936	100%	48.582.936	100%	49.554.595	100%	146.720.467			
		2.16.03.2.02	Keg. Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar							48.582.936		48.582.936		49.554.595		146.720.467	Bidang Pengembangan E-Government		
		2.16.03.2.02.01	Sub Keg. Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rapat Kerja Koordinasi dan Harmonisasi Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah					1 Kegiatan	24.582.936	1 Kegiatan	24.582.936	1 Kegiatan	25.074.595	3 Kegiatan	74.240.467				
		2.16.03.2.02.10	Sub Keg. Pengembangan Dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah area koneksi internet meningkat, Jumlah kualitas jaringan meningkat, Terlaksananya pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana aplikasi e-kinerja					1 Kegiatan	24.000.000	1 Kegiatan	24.000.000	1 Kegiatan	24.480.000	3 Kegiatan	72.480.000				
		2.16.03.2.01	Keg. Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											100%		100%		Bidang Pengelolaan Infrastruktur dan Ekosistem TIK		
		2.16.03.2.01.02	Sub Keg. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota													3 Laporan				
		2.16.03.2.02.03	Sub Keg. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah													3 Laporan				
2.16.03.2.02.04	Sub Keg. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintahan Daerah													3 Laporan						
2.16.03.2.02.07	Sub Keg. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik													3 Laporan						

2.16.03.2.02.09	Sub Keg. Pengembangan Dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas													3 Laporan			
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD yg menggunakan /memperoleh sistem data dan statistik sektoral yang terintegrasi						100%	25.095.678	100%	25.095.678	100%	25.597.592	100%	75.788.948	Bidang Statistik, Manajemen Data dan Persandian	
2.20.02.2.01	Keg. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan penyelenggaraan Statistik Sektoral yang diadakan							25.095.678		25.095.678		25.597.592		75.788.948		
2.20.02.2.01.01	Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen yang dihasilkan						1 Tahun	25.095.678	1 Tahun	25.095.678	1 Tahun	25.597.592	3 Tahun	75.788.948		
2.20.02.2.01.03	Sub Keg. Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah OPD / Perangkat Desa yang memiliki integrasi data yang baik												2 Laporan			
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase terciptanya pengamanan informasi Pemerintah Daerah												100%		Bidang Statistik, Manajemen Data dan Persandian	
2.21.02.2.01	Keg. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																
2.21.02.2.01.01	Sub Keg. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota													2 Laporan			
2.21.02.2.01.04	Sub Keg. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota													2 Laporan			
2.10.2.10.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Administrasi Perkantoran Terlaksana	100%	1.289.790.058	100%	1.111.849.486	100%							100%	2.401.639.544	Kesekretariatan	Nanga Bulik
2.10.2.10.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai dan jumlah perangko yang tersedia	750 Lembar	4.950.000	750 Lembar	3.750.000								1500 Lembar	8.700.000		
2.10.2.10.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Cakupan bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan	165.638.676	12 Bulan	169.800.000								24 Bulan	335.438.676		
2.10.2.10.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	11 Blangko Pajak	6.342.868	11 Blangko Pajak	14.110.989								22 Blangko Pajak	20.453.857		
2.10.2.10.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Cakupan bulan penyediaan administrasi jasa keuangan	12 Bulan	659.604.018	12 Bulan	651.212.996								24 Bulan	1.310.817.014		
2.10.2.10.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Cakupan bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	97.721.683	12 Bulan	5.973.000								24 Bulan	103.694.683		
2.10.2.10.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Cakupan Bulan Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja	12 Bulan	10.000.000	12 Bulan	10.500.000								24 Bulan	20.500.000		
2.10.2.10.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	31 Jenis	30.984.013	31 Jenis	45.000.000								62 Jenis	75.984.013		
2.10.2.10.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1000 Lembar	51.750.000	1000 Lembar	28.500.000								2000 Lembar	80.250.000		
2.10.2.10.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Gedung yang di instalasi	4 Gedung	5.000.000	4 Gedung	5.000.000								4 Gedung	10.000.000		
2.10.2.10.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga/perkantoran yang disediakan	12 Bulan	2.500.000	12 Bulan	7.000.000								24 Bulan	9.500.000		
2.10.2.10.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	300 Porsi	31.000.000	300 Porsi	13.000.000								600 Porsi	44.000.000		

2.10.2.10.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	100 Kali	161.848.800	100 Kali	32.047.699	-	-	-	200 Kali	193.896.499		
2.10.2.10.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah	100 Kali	62.450.000	100 Kali	125.954.802	-	-	-	200 Kali	188.404.802		
2.10.2.10.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	56.300.000	100%	80.120.000	-	-	-	100%	136.420.000	Kesekretariatan	Nanga Bulik
2.10.2.10.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	0	-	2 Unit	53.820.000	-	-	-	2 Unit	53.820.000		
2.10.2.10.01.02.09	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	2 Unit	37.300.000	0	-	-	-	-	2 Unit	37.300.000		
2.10.2.10.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah atau luasan gedung kantor yang dipelihara	2 Gedung	5.000.000	2 Gedung	8.500.000	-	-	-	2 Gedung	13.500.000		
2.10.2.10.01.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	1 Unit	9.500.000	1 Unit	17.800.000	-	-	-	1 Unit	27.300.000		
2.10.2.10.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	2 Unit	4.500.000	0	-	-	-	-	2 Unit	4.500.000		
2.10.2.10.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Rata-Rata Aparatur Pemerintah Disiplin Hadir dan Menggunakan Atribut Lengkap	100%	30.400.000	100%	38.775.000	-	-	-	100%	69.175.000	Kesekretariatan	Nanga Bulik
2.10.2.10.01.03.06	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan	45 Stel	30.400.000	45 Stel	38.775.000	-	-	-	90 Stel	69.175.000		
2.10.2.10.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidangannya	100%	100.000.000	100%	28.609.326	-	-	-	100%	128.609.326	Kesekretariatan	Nanga Bulik
2.10.2.10.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan/bimtek	17 Orang	50.000.000	17 Orang	28.609.326	-	-	-	34 Orang	78.609.326		
2.10.2.10.01.05.06	Kaji banding bidang TIK	Jumlah bulan untuk pegawai mengikuti Kaji Banding Bidang TIK	12 Orang	50.000.000	0	-	-	-	-	12 Orang	50.000.000		
2.10.2.10.01.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Cakupan pengembangan data/informasi/statistik daerah	100%	134.598.034	-	-	-	-	-	100%	134.598.034	Bidang Statistik, Manajemen Data dan Persandian	Nanga Bulik
2.10.2.10.01.15.01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Jumlah data statistik sektoral	5 Buku	70.044.392	-	-	-	-	-	5 Buku	70.044.392		
2.10.2.10.01.15.09	Pengolahan, updating dan analisa data dan statistik daerah	Jumlah data statistik sektoral yang teranalisa	5 Buku	64.553.642	-	-	-	-	-	5 Buku	64.553.642		
2.10.2.10.01.15	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	-	-	100%	34.960.000	-	-	-	100%	34.960.000	Bidang Statistik, Manajemen Data dan Persandian	Nanga Bulik
	Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi data Statistik Sektoral	Jumlah data statistik sektoral	0	-	5 Buku	15.000.000	-	-	-	5 Buku	15.000.000		
	Kajian Akademis Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi	Jumlah Kajian Akademis Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi	0	-	1 Perda/Perbup	4.960.000	-	-	-	1 Perda/Perbup	4.960.000		
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Keamanan Informasi	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Keamanan Informasi	0	-	1 Laporan	15.000.000	-	-	-	1 Laporan	15.000.000		
2.10.2.10.01.19	Program pembangunan sarana dan prasarana komunikasi	Cakupan pembangunan sarana dan prasarana komunikasi	100%	787.989.197	100%	267.949.687	-	-	-	100%	1.055.938.884	Bidang Pengelolaan Infrastruktur dan Ekosistem TIK	Nanga Bulik
2.10.2.10.01.19.06	Pengadaan dan Pemasangan Alat Komunikasi	Jumlah Alat Komunikasi Yang Terpasang	10 Alat	150.000.000	-	-	-	-	-	10 Alat	150.000.000		
	Pengadaan Aksesibilitas Jaringan Internet Pedesaan	Jumlah Jaringan Internet Pedesaan Yang Terpasang	13 Desa	251.823.000	-	-	-	-	-	13 Desa	251.823.000		
2.10.2.10.01.19.07	Fasilitasi pengadaan aplikasi	Jumlah Aplikasi Yang DiPakai	1 Aplikasi	341.166.197	-	-	-	-	-	1 Aplikasi	341.166.197		
2.10.2.10.01.19.08	Pengelolaan portal lamandau	Jumlah Portal Lamandau Yang Dikelola	1 Portal	45.000.000	-	-	-	-	-	1 Portal	45.000.000		

	Penyediaan Internet Terpusat	Terlaksananya Penyediaan Internet Terpusat		0	-	1 Kegiatan	21.890.687							1 Kegiatan	21.890.687		
	Pengadaan Server dan Storage untuk Data Center	Terlaksananya Pengadaan Server dan Storage untuk Data Center		0	-	1 Kegiatan	46.059.000							1 Kegiatan	46.059.000		
2.10.2.10.01.19.08	Renovasi Gedung RSPD	Terlaksananya Renovasi Gedung RSPD		0	-	1 Kegiatan	200.000.000							1 Kegiatan	200.000.000		
2.10.2.10.01.19	Program Pengembangan Layanan E-Government	Cakupan Pengembangan Layanan E-Government		-	-	100%	85.129.500							100%	85.129.500	Bidang Pengelolaan Infrastruktur dan Ekosistem TIK	Nanga Bulik
	Penggunaan Sistem Nashah Dinas Elektronik	Cakupan Penggunaan Sistem Nashah Dinas Elektronik		0	-	1 Laporan	23.346.250							1 Laporan	23.346.250		
	Rapat Kerja Tim SPBE	Jumlah Rapat Kerja Tim SPBE		0	-	1 Laporan	8.178.250							1 Laporan	8.178.250		
	Pemeliharaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Aplikasi E-Kinerja	Cakupan Pemeliharaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Aplikasi E-Kinerja		0	-	1 Kegiatan	34.925.000							1 Kegiatan	34.925.000		
	Pendampingan Penyiapan Aplikasi	Jumlah Pendampingan Penyiapan Aplikasi		0	-	1 Laporan	18.680.000							1 Laporan	18.680.000		
2.10.2.10.01.26	Program Keterbukaan Informasi Publik	Cakupan keterbukaan informasi publik		100%	163.420.066									100%	163.420.066	Bidang Pengelolaan Media Publik dan Kehumasan	Nanga Bulik
2.10.2.10.01.26.01	Rapat kerja harmonisasi dan sinkronisasi PPID utama dan PPID pembantu	Jumlah dokumen yang di hasilkan		2 Dokumen	52.400.000									2 Dokumen	52.400.000		
2.10.2.10.01.26.02	Pembinaan dan pengembangan sistem keterbukaan informasi publik	Jumlah Sosialisasi Tentang Keterbukaan Publik Yang Dilaksanakan		2 Kegiatan dan Dokumen	65.550.000									2 Kegiatan dan Dokumen	65.550.000		
2.10.2.10.01.26.03	Pengelolaan RSPD	Jumlah Wilayah Yang Terjangkau Siaran Radio		8 Kecamatan	45.470.066									8 Kecamatan	45.470.066		
2.10.2.10.01.27	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi, statistik dan persandian	Cakupan pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi, statistik dan persandian		100%	208.000.000									100%	208.000.000		
2.10.2.10.01.27.01	Penyusunan kajian akademik regulasi - regulasi penunjang pelaksanaan rencana induk SPBE	Jumlah kajian akademik		1 Perda/Perbup	144.000.000									1 Perda/Perbup	144.000.000	Bidang Pengembangan E-Government	Nanga Bulik
2.10.2.10.01.27.02	Penyusunan kajian akademik tentang penyelenggaraan persandian	Jumlah kajian akademik		1 Perda/Perbup	64.000.000									1 Perda/Perbup	64.000.000	Bidang Statistik, Manajemen Data dan Persandian	Nanga Bulik
2.10.2.10.01.31	Program kerjasama informasi dengan mas media	Cakupan kerjasama informasi dengan mas media		100%	29.225.000									100%	29.225.000	Bidang Pengelolaan Media Publik dan Kehumasan	Nanga Bulik
2.10.2.10.01.31.01	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Jumlah Media Yang Menginformasikan Tentang Pembangunan Daerah		2 Media	29.225.000									2 Media	29.225.000		
2.10.2.10.01.32	Program pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial		100%	38.940.000									100%	38.940.000	Bidang Pengelolaan Media Publik dan Kehumasan	Nanga Bulik
2.10.2.10.01.32.01	Kelompok Informasi Masyarakat	Jumlah KIM Yang Dibentuk Dan Dibina		15 KIM	38.940.000									15 KIM	38.940.000		
2.10.2.10.01.26	Program pengelolaan media informasi publik dan Kehumasan	Cakupan keterbukaan informasi publik		-	-	100%	1.119.303.970							100%	1.119.303.970	Bidang Pengelolaan Media Publik dan Kehumasan	Nanga Bulik
2.10.2.10.01.26.01	Pengelolaan RSPD	Jumlah Wilayah Yang Terjangkau Siaran Radio		0	-	8 Kecamatan	38.727.970							8 Kecamatan	38.727.970		
2.10.2.10.01.26.02	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Publik melalui Media	Jumlah Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Publik melalui Media		0	-	11 Media	1.072.126.000							11 Media	1.072.126.000		
2.10.2.10.01.26.03	Rapat Kerja dan Kemitraan dengan Media	Jumlah Rapat Kerja dan Kemitraan dengan Media		0	-	1 Laporan	8.450.000							1 Laporan	8.450.000		
2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran		1 Tahun	2.314.016.891	1 Tahun	2.596.150.260	1 Tahun	3.864.913.960	1 Tahun	4.090.747.700	1 Tahun	4.120.639.447	1 Tahun	16.986.468.258	Kesekretariatan	
2.16.01.2.02	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN		1 Tahun	2.314.016.891	1 Tahun	2.596.150.260	1 Tahun	2.596.160.345	1 Tahun	2.596.160.345	1 Tahun	2.596.160.345	1 Tahun	12.698.648.186		

	Sub. Keg. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN		1 Tahun	2.314.016.891	1 Tahun	2.596.150.260	1 Tahun	2.596.160.345	1 Tahun	2.596.160.345	1 Tahun	2.596.160.345	1 Tahun	12.698.648.186		
2.16.01.2.03	Keg. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan			-		-		-		45.833.740		46.750.415		92.584.155		
2.16.01.2.03.24	Sub. Keg. Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor		0	-		-		-	3 Paket	45.833.740		46.750.415		92.584.155		
2.16.01.2.04	Keg. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan			-		-		-	100%	180.000.000		183.600.000		363.600.000		
2.16.01.2.04.05	Sub. Keg. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan		0	-		-		-	48 Stell	50.000.000		51.000.000		101.000.000		
2.16.01.2.04.09	Sub. Keg. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan/bimtek		0	-		-		-	23 Orang	130.000.000		132.600.000		262.600.000		
2.16.01.2.06	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi perkantoran terlaksana			-		-	100%	347.218.585	100%	347.218.585		354.162.957		1.048.600.127		
2.16.01.2.06.01	Sub. Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah gedung yang di instalasi			-		-	4 Gedung	8.347.350	4 Gedung	8.347.350		8.514.297		25.208.997		
2.16.01.2.06.02	Sub. Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan			-		-	31 Jenis	35.670.343	31 Jenis	35.670.343		36.383.750		107.724.436		
2.16.01.2.06.03	Sub. Keg. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga/perkantoran yang disediakan			-		-	12 Bulan	69.360.960	12 Bulan	69.360.960		70.748.179		209.470.099		
2.16.01.2.06.04	Sub. Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman			-		-	300 Porsi	45.000.000	300 Porsi	45.000.000		45.900.000		135.900.000		
2.16.01.2.06.05	Sub. Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan			-		-	1000 Lembar	26.999.932	1000 Lembar	26.999.932		27.539.931		81.539.795		
2.16.01.2.06.09	Sub. Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi ke dalam dan luar daerah			-		-	200 Kali	161.840.000	200 Kali	161.840.000		165.076.800		488.756.800		
2.16.01.2.08	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Perkantoran Terlaksana			-		-	100%	824.611.030	100%	824.611.030		841.103.251		2.490.325.311		
2.16.01.2.08.01	Sub. Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim/paket pengiriman			-		-	750 Lembar	3.740.000	750 Lembar	3.740.000		3.814.800		11.294.800		
2.16.01.2.08.02	Sub. Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik			-		-	12 Bulan	200.416.655	12 Bulan	200.416.655		204.424.988		605.258.298		
2.16.01.2.08.03	Sub. Keg. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan bulan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			-		-	12 Bulan	23.100.000	12 Bulan	23.100.000		23.562.000		69.762.000		
2.16.01.2.08.04	Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan bulan penyediaan jasa administrasi keuangan yang disediakan, cakupan bulan penyediaan jasa kebersihan kantor			-		-	12 Bulan	597.354.375	12 Bulan	597.354.375		609.301.463		1.804.010.213		
2.16.01.2.09	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Perkantoran Terlaksana			-		-	100%	96.924.000	100%	96.924.000		98.862.480		292.710.480		
2.16.01.2.09.01	Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara			-		-	1 Mobil Jabatan	45.184.000	1 Mobil Jabatan	45.184.000		46.087.680		136.455.680		
2.16.01.2.09.02	Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara			-		-	2 Unit	7.100.000	2 Unit	7.100.000		7.242.000		21.442.000		
2.16.01.2.09.07	Sub. Keg. Pemeliharaan aset tetap lainnya	Jumlah atau luasan gedung kantor yang dipelihara			-		-	2 Gedung	44.640.000	2 Gedung	44.640.000		45.532.800		134.812.800		
TOTAL					3.862.889.188		4.250.997.743		5.246.619.743		5.312.928.988		5.379.353.854		24.052.789.516		